



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KATA PENGANTAR

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur menyusun Laporan Kinerja tahun 2021. Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan dikaitkan dengan Rencana Strategis Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026.

Renstra BPBD menjadi dokumen acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan unit kerja BPBD pada periode tahun 2021 sampai dengan 2026. Untuk mewujudkan tujuan yang tertuang dalam Renstra BPBD Kab. Luwu Timur, dijabarkan dalam satu sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi bencana dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah. Dalam pencapaian sasaran perlu menyesuaikan dan mempertimbangan tantangan-tantangan yang ada dalam pencapaian target agar pelaksanaan berjalan lebih efektif dan efisien.

Penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi tentang prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan merupakan kewajiban setiap SKPD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan ditahun mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2021, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja ini disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan tersebut, semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi BPBD Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Malili, 07 Februari 2022

KEPALA PELAKSANA,



Drs. MUH. ZABUR

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660930 198603 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

VISI

“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”

MISI

MISI Ke- 3 RPJMD

“Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas”

MISI Ke- 4 RPJMD

“Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik”

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	NOTIFIKASI ■ Tercapai ■ Tidak Tercapai	CAPAIAN KINERJA
I. Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	➔	1. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) = 0,43
II. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	➔	1. Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota = 108,36 %
a. Meningkatnya upaya penyebaran informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana	➔	1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 88,23 %
b. Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan	➔	2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 100%
c. Terselenggaranya penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi	➔	1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender = 100%
d. Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	➔	1. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar = 102,94%

1. Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kepada warganegara yang berada dikawasan rawan bencana dan yang		1. Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 0,093%
2. Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan pemerintah dan warganegara untuk mengurangi dampak		1. Persentase warga negara yang meperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 0,33%
3. Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin bencana		1. Persentase warga negara yang meperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender = 100%
4. Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat		1. Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu = 125%
5. Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah		1. Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik = 89.47%
6. Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah		1. Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar = 100%
7. Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah		1. Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah = 125%
8. Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		1. Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah = 105,3%
9. Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		1. Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi = 85,71%
10. Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1. Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah = 99.86%
11. Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai		1. Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik = 93,25%

DAFTAR ISI

	<i>hal.</i>
KATA PENGANTAR	<i>i</i>
DAFTAR ISI	<i>ii</i>
DAFTAR TABEL	<i>iii</i>
DAFTAR GAMBAR	<i>iv</i>
DAFTAR GRAFIK	<i>v</i>
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Data Umum Organisasi	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Peran dan Struktur Organisasi	2
1.4 Isu Strategis/Permasalahan	6
1.5 Sistematika Penyusunan.....	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	8
a. Visi dan Misi	9
b. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Jangka Menengah	9
2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	15
3.2 Realisasi Anggaran	60
BAB IV PENUTUP	

DAFTAR TABEL

hal.

Tabel 1	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA BPBD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dan Target Jangka Menengah	12
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021	13
Tabel 3	Program dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2021	14
Tabel 4	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	16
Tabel 5	Pengukuran Capaian Kinerja	17
Tabel 6	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke- 1	19
Tabel 7	Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021	22
Tabel 8	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	25
Tabel 9	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	25
Tabel 10	Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	26
Tabel 11	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 - 2026)	27
Tabel 12	Target SPM Capaian Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	28
Tabel 13	Realisasi Target SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	29
Tabel 14	Alokasi Anggaran Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	29
Tabel 15	Kendala, Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	30
Tabel 16	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	34
Tabel 17	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	36
Tabel 18	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	41
Tabel 19	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pendukung	48
Tabel 20	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	51
Tabel 21	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	52
Tabel 22	Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	52
Tabel 23	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 - 2026)	53
Tabel 24	Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung	54
Tabel 25	Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021	70

Tabel 26	Permasalahan dan Solusi	74
----------	-------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

	<i>hal.</i>
Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021	3

DAFTAR GRAFIK

	<i>hal.</i>
Grafik 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 ...	2
Grafik 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021	2
Grafik 3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021.....	17
Grafik 4 Capaian Kinerja Sasaran Penunjang Tahun 2021.....	18
Grafik 5 Prioritas penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021.....	20
Grafik 6 Capaian Indikator Program Penanggulangan Bencana Tahun 2021.	33
Grafik 7 Data Kejadian Bencana Tahun 2019-2021	47
Grafik 8 Data Kejadian Bencana Tahun 2019-2021	48
Grafik 9 Realisasi Anggaran Tahun 202	69

BAB 1**PENDAHULUAN****1.1 TUGAS DAN FUNGSI**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan peraturan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Tugas* : membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana daerah,
- Fungsi* : - Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 53 Tahun 2016.

Sumber Daya Manusia (SDM)

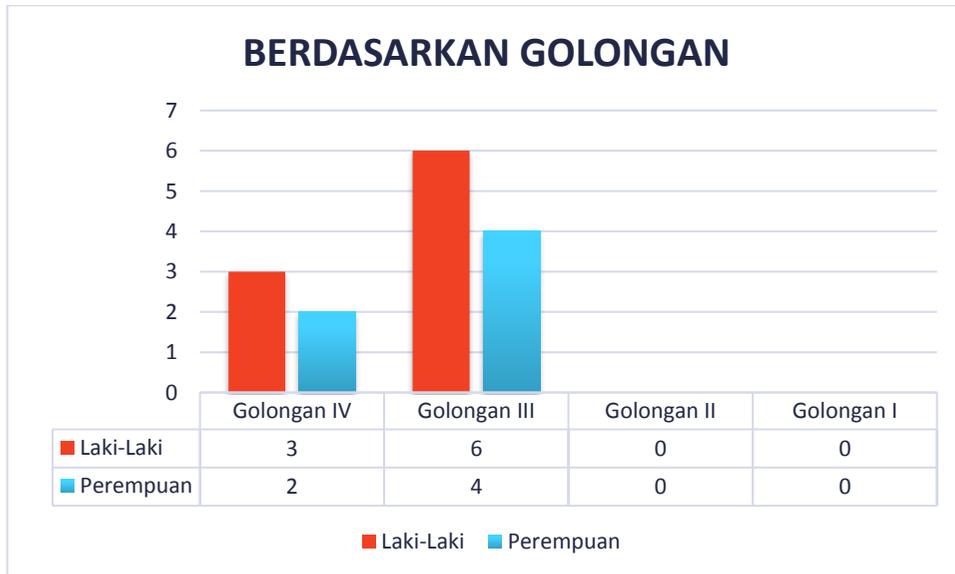
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 43 orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 15 orang dan Tenaga Upah Jasa 28 orang (Tenaga Administrasi 1 orang, Cleaning Service 1 orang, Sopir 1 orang dan Tim Reaksi Cepat 25 orang). Struktur

tingkat pendidikan SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut :



Grafik. 1

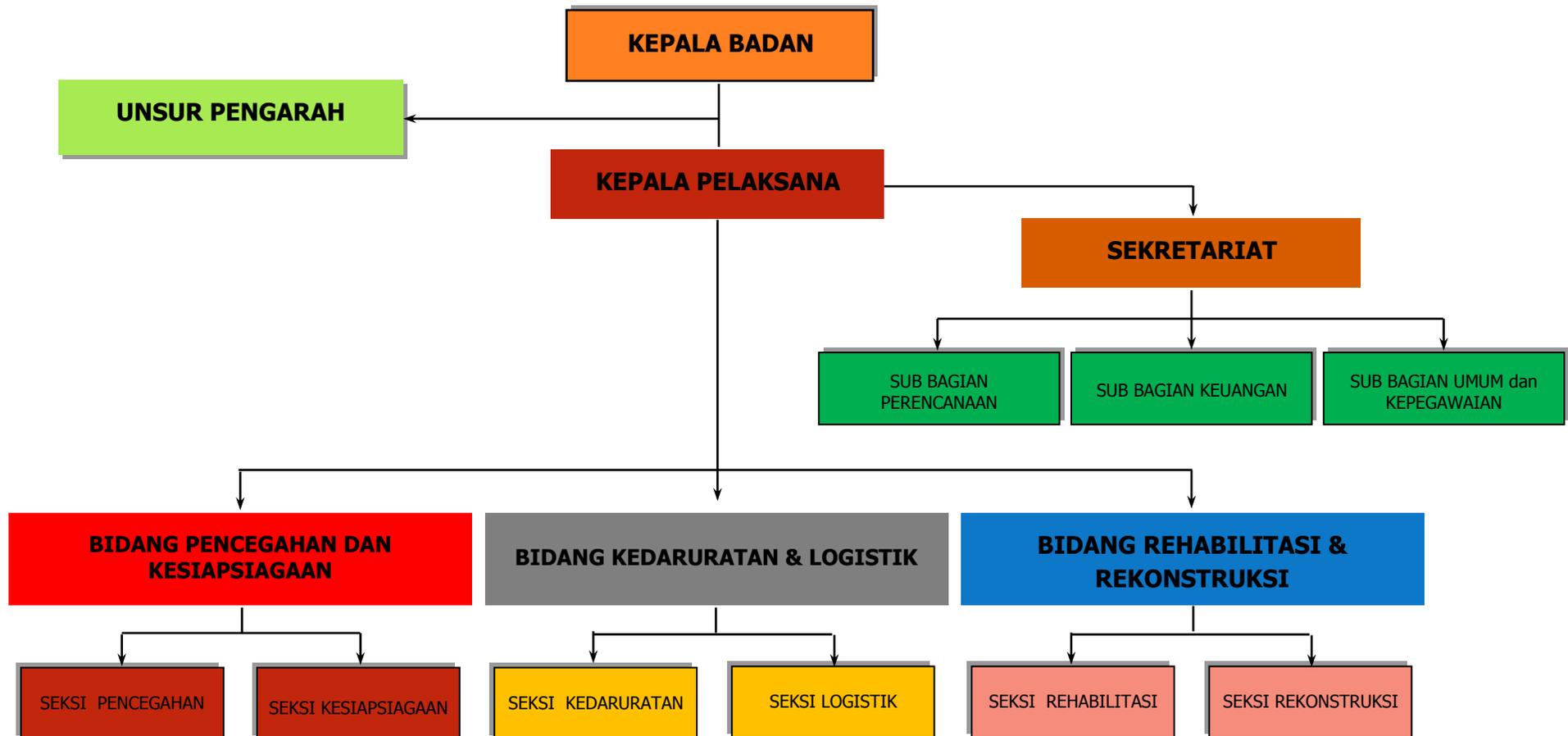
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021



Grafik. 2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

Gambar 1
 Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur
 Tahun 2021



1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh [Badan Nasional Penanggulangan Bencana](#). BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan **Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana** (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan **Satuan Pelaksana Penanganan Bencana** (Satlak PB) di tingkat Kabupaten / Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.

Oleh karena hal tersebut, pemerintah membuat Undang-Undang tentang penanggulangan bencana yang dituangkan pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 27 UU tersebut menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana. UU ini juga mengatur keterlibatan pihak swasta, lembaga-lembaga non-pemerintah dan lembaga internasional dalam penanggulangan bencana. Undang-Undang atau Peraturan ini dibuat sebagai payung hukum mengenai proses penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang ini dimulai dari prabencana, pada saat bencana hingga proses pemulihan pasca bencana diatur di dalamnya. BNPB dan BPBD dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru. Dimana perspektif ini memberi penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan resiko serta penanganan korban. Kinerja organisasi merupakan salah satu sorotan yang paling tajam dalam pelaksanaan pemerintahan menyangkut kesiapan, jumlah pendidikan dan profesionalisme. BPBD Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu organisasi pemerintahan yang berwenang dalam penanggulangan bencana, memiliki peran dalam penyelenggaraan penanggulangan atas berbagai bencana di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Luwu Timur diperlukan kesiapan yang mantap demi terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Dalam penanganan bencana dibutuhkan kesiagaan dan kecepatan seluruh unsur aparat dari berbagai instansi tanpa terkecuali. Sehingga ketika bencana tiba sudah tidak perlu birokrasi administrasi, koordinasi dan himbauan lagi. Akan tetapi yang terpenting adalah aparat akan bisa hadir dengan cepat di tengah masyarakat ketika bencana terjadi hal itulah yang perlu dibenahi dari sekarang dan itu menjadi tugas BPBD yang bukan hanya sekedar menanggulangi saat terjadi bencana namun juga melakukan koordinasi mulai dari sebelum terjadi bencana, sampai pasca bencana.

1.4 ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 telah diatur tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur antara lain membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan bencana serta berfungsi merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana dengan memberikan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya BPBD Kabupaten Luwu Timur mendukung dan mewujudkan tercapainya sasaran strategis Daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu **“Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (S7)”**. Namun dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur masih terdapat isu-isu strategis antara lain :

1. Adanya pandemi Covid-19 yang berimbas pada Refocussing program dan kegiatan/sub kegiatan
2. Belum maksimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada sub urusan bencana;
3. Belum terintegrasinya program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
4. Dokumen RTRW yang ada perlu diselaraskan dengan kajian risiko bencana yang ada.
5. Belum tersedianya perencanaan penanganan bencana (Rencana Kontijensi) terhadap ancaman bencana yang ada untuk semua jenis bencana
6. Tingginya tingkat kerawanan bencana Kabupaten Luwu Timur
7. Luasnya cakupan wilayah pelayanan penanggulangan bencana
8. Masih lemahnya upaya pencegahan dan mitigasi dalam rangka pengurangan risiko bencana.
9. Masih lemahnya upaya kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif
10. Belum adanya Forum PRB dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah
11. Belum memadainya mekanisme pendukung dalam penyelenggaraan pemulihan dampak bencana.

12. Minimnya pengalokasian anggaran Belanja Tidak terduga khusus bencana
13. Kurangnya koordinasi dan kerja sama antar daerah dalam penanggulangan bencana
14. Rendahnya partisipasi multi-pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
15. Terbatasnya jumlah personil penanggulangan bencana yang memenuhi standar kualifikasi
16. Keterbatasan sarana-prasarana pendukung upaya penanggulangan bencana.

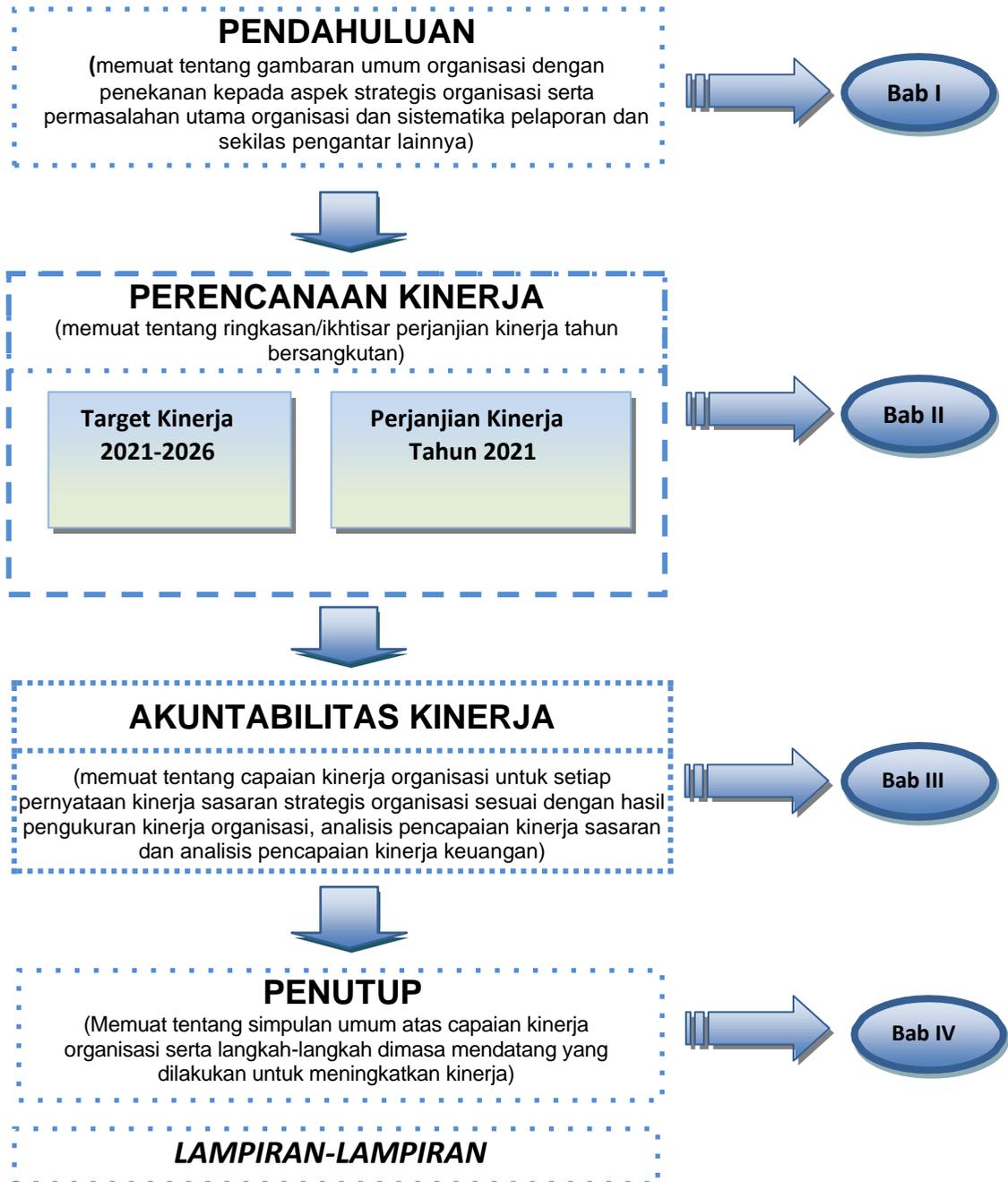
1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja ini pada dasarnya adalah suatu media untuk mengomunikasikan capaian kinerja BPBD Kabupaten Luwu Timur selama Tahun 2021. Capaian Kinerja tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2021 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021, yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan di masa datang. Artinya, terhadap capaian yang telah mencapai atau melebihi target (sudah baik) agar tetap dipertahankan, sedangkan terhadap capaian kinerja yang masih di bawah target untuk masa mendatang dapat dilakukan perbaikan melalui strategi-strategi yang lebih baik.

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika penulisan dengan bagan sebagai berikut :

Referensi Bab



BAB 2**PERENCANAAN KINERJA**

Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama setiap perangkat daerah, termasuk BPBD. Peningkatan ini terlihat dari penajaman program pada Renstra 2021– 2026.

Program pada Renstra BPBD periode 2021-2021 berbeda dari Renstra periode sebelumnya yaitu diselaraskan dengan program nasional yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Bencana dan disesuaikan juga dengan Program Prioritas (KP1) Kepala Daerah. Berdasarkan Renstra BPBD 2021-2026, mencakup satu sasaran utama yaitu Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana, dan sasaran pendukung yaitu Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah.

A. TARGET KINERJA TAHUN 2021-2026

Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Luwu Timur yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur. Hal ini merupakan upaya untuk mengefektifkan dan mengarahkan sumber daya BPBD dalam mewujudkan peran BPBD sebagai pelaku utama dalam penanggulangan bencana dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana daerah. Dalam melaksanakan tugas, BPBD menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Fungsi tersebut diformulasikan ke dalam tujuan dan sasaran BPBD dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dalam RPJMD 2021-2026. Visi yaitu keadaan umum yang diinginkan pada akhir tahun 2026 atau setelahnya dan misi atau rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, strategi atau program-program indikatif untuk mencapai visi dan misi.

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang, dengan kata lain visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”

2. Pernyataan Misi

Misi adalah segala sesuatu (strategi, tindakan) yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Luwu Timur yaitu

MISI Ke- 3 RPJMD

“Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas”

Sasaran 7 RPJMD

“Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana”

MISI Ke- 4 RPJMD

“Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik”

Sasaran 9 RPJMD

“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”

3. Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik dan dapat terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 yang tertuang dalam RENSTRA yang berkaitan dengan Visi dan Misi yang diemban oleh BPBD Kab. Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.
Tujuan, Sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja sasaran RENSTRA BPBD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir 2026
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Menurunkan Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	202	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,50	0,50
2.	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90	95	95	95	97	98	100	100

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran kegiatan dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja kegiatan. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis, di tahun 2021 disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran kegiatan, kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2021 yang merupakan kesanggupan untuk melaksanakan kinerja, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 yang telah dilakukan revisi atau perubahan karena adanya perubahan target kinerja dan pagu anggaran, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,43 (sedang)
2.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95%

Penetapan kinerja dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 didukung dengan pembiayaan APBD-P Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 4.915.970.761,-** (*Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*), terdiri dari belanja pegawai **Rp 1.941.900.589,-** belanja barang dan jasa **Rp. 2.698.323.172,-** dan belanja modal **Rp 275.747.000,-**.

Adapun program dan anggaran secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.
Program dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2021

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	2.967.663.734,-	APBD
2	Program Penanggulangan Bencana	1.948.307.027,-	APBD
JUMLAH		4.915.970.761,-	

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan mampu mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip-prinsip dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu **pertama**, Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, yang mengandung pengertian bahwa hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan, **kedua**, Prinsip Prioritas, yang mengandung pengertian bahwa yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya, **ketiga**, Prinsip Manfaat, yang mengandung pengertian bahwa manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur melaksanakan kewajiban dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui keberhasilannya dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana

Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2021 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2021 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut :

Tabel. 4
Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90	Sangat memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
6.	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

Adapun capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 5
Pengukuran Capaian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	NOTIFIKASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,43 %	0,43 %	100	●
2.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95%	102,94%	108,36	●

Keterangan : ● Mencapai/Melampui Target ; ● Belum Mencapai Target

Sasaran Strategis I

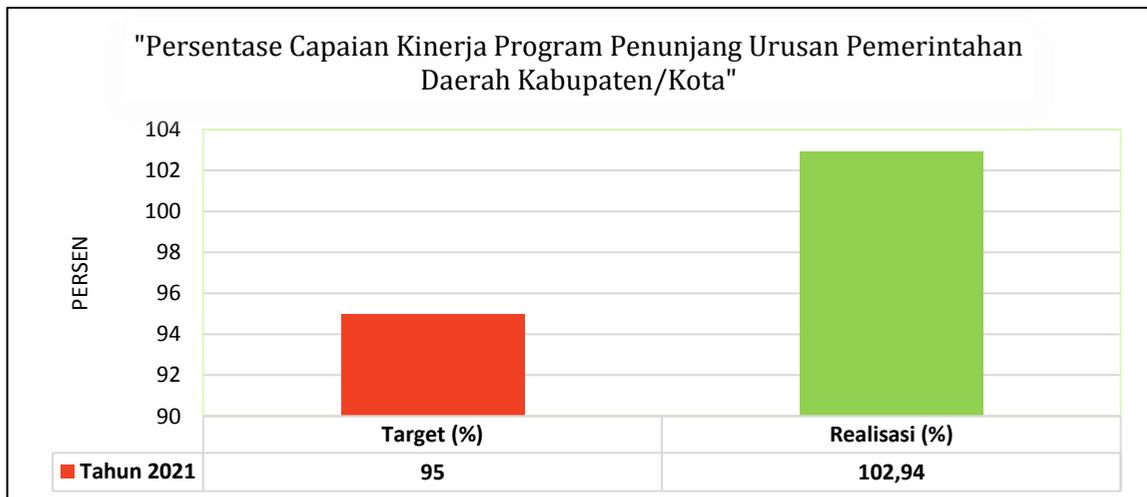
Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana



Grafik. 3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021

Sasaran 2 (Sasaran Pendukung)

Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah



Grafik. 4
Capaian Kinerja Sasaran Penunjang Tahun 2021

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian tiga sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

SASARAN STRATEGIS 1

“Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana”

Tabel. 6
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke -1

Sasaran I	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana		
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.43	0.43	100%

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : **“Nilai Indeks Ketahanan Daerah”**

Indikator sasaran BPBD Kabupaten Luwu Timur adalah Indeks Ketahanan Daerah dengan target tahun 2021 adalah 0,43 dan telah tercapai 0,43 dengan persentase capaian kinerja 100% dari target yang telah ditetapkan. Capaian target tersebut diperoleh dari pengimputan Tools 71 Indikator berdasarkan baseline data 2018-2021 yang bersumber dari OPD terkait seperti Bappelitbangda, Dinas PU & PR, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan dsb.

Salah satu strategi dalam menurunkan Indeks Risiko Bencana adalah peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten, kota dan propinsi.

Dalam penilaian Indeks Ketahanan Daerah terdapat 71 indikator yang dipedomani dengan 7 program prioritas yaitu : Penguatan kelembagaan dan kebijakan, Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, Pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, Penanganan tematik kawasan rawan bencana, Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Adapun hasil dari penilaian indeks kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 adalah :

1. Penguatan kelembagaan dan kebijakan, yaitu :
 - Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah
 - Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2021 tentang SOTK BPBD
 - Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang RTRW Kab. Luwu Timur 2011-2031
 - Rencana Detail Tata Ruang 2015-2025
 - Rencana Detail Tata Ruang Wotu, Malili, Wasuponda, Towuti, Mangkutana, Tomoni dan Tomoni Timur
 - Perda Nomor 7 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup
 - Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 tentang bangunan Gedung
 - Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, yaitu :
 - Dokumen Kajian Risiko Bencana Kab. Luwu Timur
 - Peta Bahaya/Peta Risiko Bencana Kab. Luwu Timur
 - Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kab. Luwu Timur
3. Pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, yaitu :
 - PUSDALOPS BPBD
 - Pelatihan Penanggulangan Bencana setiap tahun
 - Gladi Penanggulangan Bencana setiap tahun
 - Pengadaan kebutuhan logistik dan peralatan bencana setiap tahun
 - Penyimpanan/Gudang Logistik BPBD
 - Pemeliharaan peralatan dan suplay logistik secara periodik
 - Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat.
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana, yaitu :
 - Penataan Ruang berbasis PRB
 - Desa Tangguh Bencana
 - Rumah Sakit terakreditasi (RS. I Lagaligo dan RS. Primaya Hospitasl Inco Soroako)
 - Puskesmas terakreditasi 17 dari 18 Puskesmas
5. Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, yaitu :
 - Rehabilitasi tanggul sungai
 - Normalisasi/Restorasi sungai

- Pembangunan Bendung Sungai
 - Bangunan penahan gelombang (Pembangunan Sea Wall Pantai Lemo Desa Mabonta)
 - Bangunan Perkuatan Tebing Sungai
 - Pembangunan Embung
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, yaitu :
- Dokumen Rencana Kontigensi Banjir
 - Sistem Peringatan Dini Banjir di Sungai Kalaena (Sirine Banjir dan Sensor TMA Sungai)
 - Penentuan Status Darurat Bencana
 - Penerapan Sistem Komando Operasi Darurat
 - Pengerahan Tim Reaksi Cepat ke lokasi bencana
 - Pengerahan Tim SAR/BASARNAS
 - Pengerahan Bantuan Masyarakat dan Dunia Usaha
 - Penghentian Status Darurat Bencana
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana, yaitu :
- Perbaiki rumah penduduk (pasca bencana).

**Grafik. 5**

Prioritas penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel. 7

Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0.57	0.43	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0.80		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0.37		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.63		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0.56		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0.32		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.20		

- ❖ Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yaitu :
 - Program Penanggulangan Bencana :
 1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- ❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD), terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

 - Keterbatasan anggaran untuk pengurangan risiko bencana (pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan) yang melekat pada OPD strategis dan bukan hanya di BPBD
 - Ketersediaan data dan informasi dari OPD terkait
 - Ketersediaan anggaran pelaksanaan FGD untuk penilaian IKD baru dianggarkan pada tahun 2022.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- Mengusulkan penggunaan dana desa untuk kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
- melakukan penjemputan data dan informasi ke OPD terkait
- segera melakukan FGD untuk penilaian IKD.

❖ **Efisiensi Anggaran**

Dalam pencapaian sasaran strategis BPBD, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Efisiensi anggaran pada belanja modal pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang masih dapat ditunda pelaksanaannya.
- Efisiensi anggaran perjalanan dinas luar daerah
- Terkait kebutuhan logistik penanggulangan bencana, pada tahun 2021, BNPB memfasilitasi logistik untuk korban bencana yaitu : Logistik Siaga Darurat 10 paket, sandang 5 paket, Paket Kesehatan Keluarga 5 paket, Family Kit 5 paket, Logistik Pangan (Beras, Mie Instan, Air Mineral, Minyak Goreng, Ikan Kaleng, Gula Pasir) 100 paket, Perlengkapan Keluarga (Sabun Mandi, Sikat gigi, Pasta gigi, Shampo, Handuk Kecil, Handuk Dewasa, Pembalut, Sarung, Minyak Kayu putih) 70 paket, Perlengkapan Bayi (Minyak telon, Popok, Bedak Bayi) 70 paket, Shelter Kit (Terpal, Selimut, Alas Tidur) 60 paket dan Masker Medis 6000 pcs.
- Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar lainnya untuk korban bencana seperti beras dan bahan makanan pokok lainnya selain dari BPBD sendiri, juga difasilitasi oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Dalam pelaksanaan Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, capaian kinerja melebihi dari target yang direncanakan, dari target 450 org dan terealisasi 834 org karena adanya dukungan makanan dan minuman dari PT. Vale Indonesia dan dari Bank Sulselbar sehingga dalam pelaksanaan gladi dapat melibatkan banyak orang, dan hal ini berimplikasi terhadap capaian SPM urusan bencana.

❖ Efisiensi Sumber Daya

- Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi maupun pengetahuan tentang kebencanaan, maka dapat terfasilitasi dengan adanya papan himbauan atau peringatan dini yang ditempatkan pada beberapa kecamatan sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi terkait kebencanaan dari media atau papan himbauan peringatan dini tersebut. Dan penyebarluasan informasi kebencanaan juga dilakukan melalui Media Sosial yaitu PUSDALOPS BPBD.
- Sumber daya yang ada pada BPBD Kabupaten Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan masih belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, BPBD tetap berupaya untuk bekerja maksimal dalam penanggulangan bencana. Sumber daya manusia yang ada di BPBD Kabupaten Luwu Timur sebanyak 43 orang yang terdiri dari 15 orang PNS, 3 orang Upah Jasa, dan 25 orang Tim Reaksi Cepat (TRC). Dengan membandingkan luas cakupan wilayah pelayanan penanggulangan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada. Maka dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Luwu Timur memaksimalkan tenaga relawan-relawan dari berbagai komunitas seperti Tim Relawan Penanggulangan Bencana yang berjumlah 182 orang yang tersebar di 11 kecamatan, BASARNAS, Tim SAR, TAGANA, PMI dsb. Sedangkan dari segi sumberdaya sarana dan prasarana dalam hal ini terkait peralatan bencana, BPBD memaksimalkan peralatan yang dimiliki oleh OPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Dinas Perhubungan, BASARNAS dsb.
- Terkait pemulihan sarana dan prasarana fisik serta nonfisik pasca bencana, juga dapat difasilitasi oleh SKPD terkait seperti Dinas PU & PR, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. Jadi dalam hal ini bahwa pemulihan sarana dan prasarana fisik serta nonfisik pasca bencana dapat terwujud melalui kerjasama/koordinasi lintas sektoral baik itu dari BPBD maupun OPD terkait dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada.

❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel. 8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.43	0.43	100%	1.948.307.027	1.639.892.198,20	84,17%
Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	88.23%	88.23%	107.286.470,-	86.193.250,-	80,34%
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	634.827.561,-	538.465.344,20	84,82%
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100%	100%	100%	1.206.192.996,-	716.108.231	97,79%

Tabel. 9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	100%	84,17%	15,83%

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana sebesar 100% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 84,17%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 15,83%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Jadi dalam hal ini ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu :

- Adanya Data Base (Baseline 2018) berdasarkan hasil penilaian Indeks Ketahanan Daerah yang merupakan bagian dari penilaian Kota Tangguh Bencana pada Tahun 2018
- Telah dilakukan pemutakhiran data IKD pada bulan Nopember 2021 oleh BPBD Propinsi Sul-Sel
- Terdapat beberapa rekomendasi pada penilaian IKD tahun 2018 yang telah ditindaklanjuti seperti penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Banjir, PUSDALOPS BPBD, Sistem Peringatan Dini Banjir (EWS), RDTR yang telah berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan beberapa rencana penyusunan dokumen kebencanaan yang telah tertuang dalam dokumen Renstra BPBD 2021-2026.

2. Perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun sebelumnya

Tabel. 10
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran I :	Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi Bencana						Target Tahun 2026
	Tahun 2018			Tahun 2021			
Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.42	0.42	100 %	0.43	0.43	100 %	0.50 (sedang)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa capaian tahun 2021 hanya dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2018 berdasarkan dari hasil penilaian IKD pada Penilaian Kota Tangguh Bencana yang difasilitasi oleh BNPB.

Namun tidak dapat dibandingkan untuk tahun 2019 dan 2020, karena adanya perbedaan indikator yang digunakan dalam Renstra periode 2016-2021 dengan Renstra Periode 2021-2026.

Target yang ditetapkan untuk tahun 2021 lebih tinggi dari target tahun 2018 dan capaiannya 100%. Ini berarti bahwa telah ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Target yang meningkat dengan capaiannya 100% karena dari 71 indikator yang menjadi penilaian dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD), terdapat beberapa dipenuhi misalnya Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Banjir, Kajian Risiko Bencana telah terintegrasi dalam penyusunan RDTR beberapa kecamatan, telah dilakukan Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana dsb.

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan realisasi tahun 2021 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, sangat memungkinkan dapat dicapai. Dan upaya yang dilakukan adalah melakukan pemutakhiran Nilai IKD melalui FGD Penilaian Indeks Ketahanan Daerah setiap tahunnya, agar 7 prioritas dengan 71 indikator dapat dipenuhi secara bertahap, yang pada akhirnya dapat menurunkan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Luwu Timur.

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada tahun 2021 dengan target jangka menengah pada Renstra BPBD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 11
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Jangka Menengah
(2021 - 2026)

Sasaran I :	Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi Bencana		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2021 terhadap target akhir Renstra 2026
	Realisasi			
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021	rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2021		
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.43	0.43	0.50 (sedang)	86%

5. Perbandingan dengan Target Nasional (SPM Penanggulangan Bencana)

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, maka terdapat 3 jenis pelayanan dasar pada sub urusan bencana yang wajib dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

1. Pelayanan informasi rawan bencana
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Adapun **Target nasional** dari ketiga jenis pelayanan dasar tersebut adalah **100% setiap tahun**. Olehnya itu perbandingan antara target nasional dengan capaian Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 12

Target SPM Capaian Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun

Tabel. 13

Realisasi Target SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Uraian Kinerja			Anggaran		(%)
		Indikator Capaian	Target (%)	Realisasi (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Informasi Rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	88.23%	107,286,470	86,193,250	80.34
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	290,937,586	256,392,350	88.13
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	1,206,192,996	1,015,233,604	84.17

Tabel. 14

Alokasi Anggaran Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan / sub Kegiatan	Alokasi Biaya		
			Anggaran		
			APBN	APBD	Sumber dana lain yang sah
1	2	3	4	5	6
		Program Penanggulangan Bencana	-	1,604,417,052	-
1	Pelayanan Informasi Rawan bencana	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	107,286,470	-
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	107,286,470	-
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	290,937,586	-
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	-	144,178,556	-

		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	-	9,000,000	-
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	-	85,784,820	-
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	51,974,210	-
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	1,206,192,996	-
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	-	775,623,100	-
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	100,130,000	-
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	160,491,078	-
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemil/ Wabah Penyakit	-	169,948,818	-

Tabel. 15
Kendala, Permasalahan dan Solusi
SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	SOLUSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	(1).Adanya penerapan PPKM yang semula dari PPKM level 3 menjadi PPKM level 4, menyebabkan beberapa kegiatan tertunda pelaksanaannya sampai dengan triwulan IV. Dan hal tersebut berpengaruh terhadap tingkat kehadiran peserta dalam pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana. Dan hal ini mempengaruhi tingkat capaian SPM. (2).Keterbatasan Anggaran/pembiayaan penanggulangan bencana	(1).Memaksimalkan penyebarluasan informasi rawan bencana melalui Pusdalops Penanggulangan Bencana, Papan Hibauan Peringatan Dini dan Media Sosial, (2).Memaksimalkan keterlibatan Dunia Usaha dan Masyarakat dalam penyebarluasan informasi rawan bencana, (3).Meningkatkan koordinasi di lingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan.

2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	(1). Adanya penerapan PPKM yang semula dari PPKM level 3 menjadi PPKM level 4, menyebabkan beberapa kegiatan tertunda pelaksanaannya sampai dengan triwulan IV. Dan hal tersebut berpengaruh terhadap tingkat kehadiran peserta dalam pelaksanaan kegiatan. Dan hal ini mempengaruhi tingkat capaian SPM. (2). Keterbatasan Anggaran/pembiayaan penanggulangan bencana	(1).Meningkatkan koordinasi diilingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan, (2).Memaksimalkan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	(1).Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, (2).Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada, (3).Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang memahami mekanisme penanggulangan bencana baik secara teknis maupun non teknis	(1).Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan melalui BNPB dan BMKG, (2).Penguatan Tim Relawan Penanggulangan Bencana di Kecamatan, (3).Pembentukan Posko Terpadu Penanggulangan Bencana, (4). Keikutsertaan dalam kegiatan Diklat Kebencanaan baik yang dilaksanakan oleh BNPB, BASARNAS, BPBD Provinsi dan BPBD Kab. Luwu Timur

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

❖ Program Program Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tujuan program penanggulangan bencana yaitu : memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan, menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sasaran program adalah : (1) Meningkatnya upaya penyebaran informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana, (2) Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban

jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan bencana, (3) Terselenggaranya penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana

Indikator Program Penanggulangan Bencana Tahun 2021 adalah :

1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Indikator SPM Sub Urusan Bencana)

Formulasi : "Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi jumlah seluruh warga negara yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus".

Target tahun 2021 adalah 100% dan realisasi 88,23% dengan persentase capaian kinerja 88,23%. Capaian tersebut berasal dari pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten 280 org, Layanan Informasi kebencanaan melalui PUSDALOPS BPBD 4.953 org, Papan himbuan informasi bencana di 9 kecamatan 234.687 org dan Rambu evakuasi di 8 desa di Kec. Malili 26.578 org dengan akumulasi sebesar 266.498 org dibagi jumlah penduduk Kab. Luwu Timur 302.039 jiwa. Realisasi yang tidak sesuai dengan target karena terdapat 2 kecamatan yang tidak dipasang papan himbuan karena kondisinya rusak berat.

2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Indikator SPM Sub Urusan Bencana)

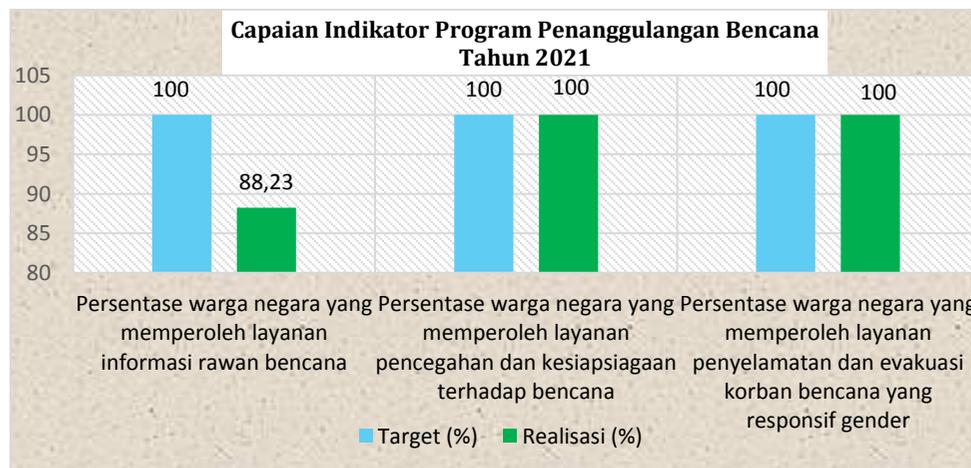
Formulasi : "Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi jumlah seluruh warga negara yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus".

Target tahun 2021 adalah 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian tersebut berasal dari pelaksanaan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 116 org, Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 834 org, Penempatan alat deteksi gempa lokal sesar matano di 3 lokasi yaitu Desa Matompi, Desa Atue dan Desa Kalpataru, Penempatan alat deteksi banjir di Kec. Kalaena dan Alat deteksi gempa bumi sesar-sesar dari luar Kab. Luwu Timur. Dan semua peralatan tersebut dapat memantau seluruh wilayah kabupaten Luwu Timur, dan dapat diasumsikan bahwa seluruh warga negara yang ada di Kab. Luwu Timur yang berjumlah 302.039 jiwa memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

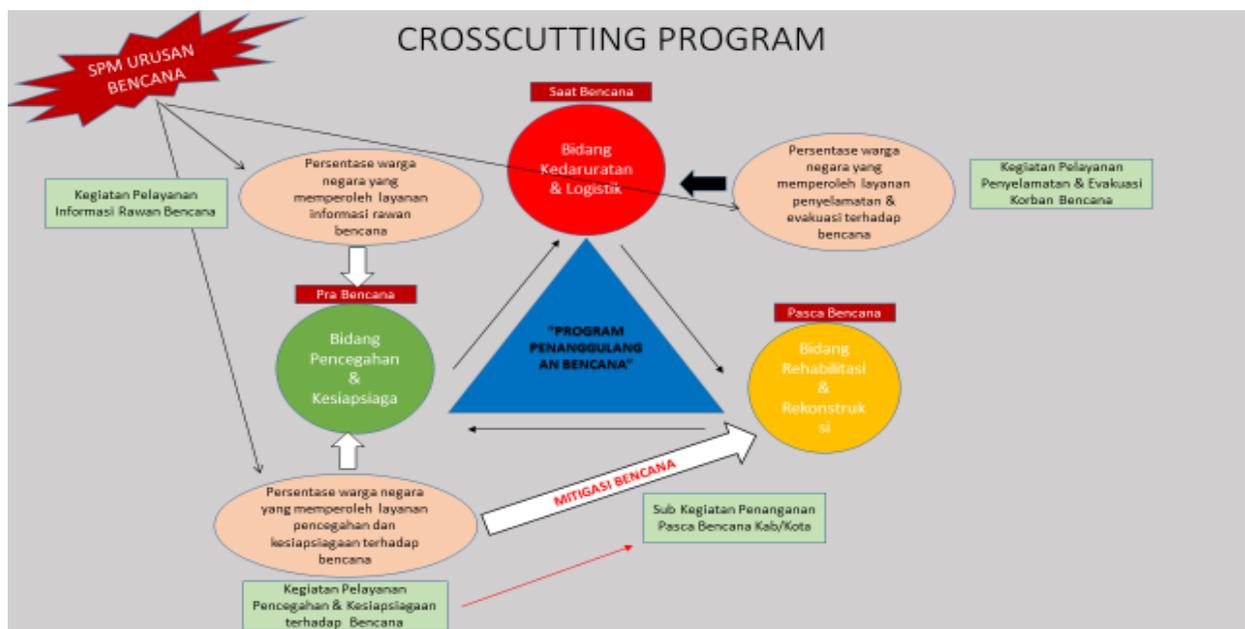
3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender (Indikator SPM Sub Urusan Bencana)

Formulasi : “Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana dibagi jumlah seluruh keseluruhan korban bencana dikali seratus”.

Target tahun 2021 adalah 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana bulan januari s.d Desember 2021 sebanyak 250 jiwa dan semuanya memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi. Jumlah tersebut merupakan akumulasi total korban bencana dari 178 kejadian bencana yang terjadi di Kab. Luwu Timur.



Grafik. 6
Capaian Indikator Program Penanggulangan Bencana Tahun 2021



Pada tahun 2021, Program Penanggulangan Bencana didukung oleh 3 kegiatan Utama yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bencana yaitu :

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Tabel. 16
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kepada warganegara yang berada dikawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0,10%	0,093 %	93%
a.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (Per Jenis Bencana)	Terselenggaranya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	300 org	280 org	93,33%

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Dengan dasar pemikiran bahwa informasi rawan bencana sangat penting diberikan kepada Warga Negara agar diketahui ancaman bencana dapat terjadi dan dapat membahayakan keselamatan manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi rawan bencana agar warga negara lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada diwilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (hazard/bahaya) dan kerentanan (vulnerability) yang dimiliki serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.

Indikator kegiatan adalah Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dengan **Formulasi** : Jumlah warga negara yang berada di daerah rawan yang mengikuti sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana dibagi jumlah seluruh warga negara yang berada di

daerah rawan bencana dikali seratus. Target Tahun 2021 adalah 0,10% (300 org) dan realisasi 0,093% (280 org) dengan persentase capaian kinerja 93%.

Pencapaian target Kegiatan ini didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota**

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan dengan target 300 orang dan realisasi 280 orang, persentase capaian 93,33%. Capaiannya kurang dari target karena kegiatan yang dilaksanakan akhir tahun dengan mengundang kepala desa, aparat desa dan relawan yang kemungkinan besar mempunyai kegiatan yang bersamaan pada akhir tahun. Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan ini direncanakan pada triwulan III namun baru dapat terlaksana pada triwulan IV karena adanya Instruksi Bupati terkait penerapan PPKM yang semula dari PPKM level 3 menjadi PPKM level 4 sehingga dihimbau untuk tidak melaksanakan kegiatan yang menghadirkan banyak orang yang berpotensi dalam penyebaran virus covid-19. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 107.286.470,- dan realisasi Rp. 86.193.250,- (80,34%) terdapat sisa anggaran yang cukup besar yaitu Rp. 21.093.220,- karena jumlah peserta yang hadir hanya 280 orang dari 300 orang peserta yang diundang, sehingga mempengaruhi realisasi keuangan beberapa jenis belanja yang disediakan untuk peserta sosialisasi. Namun telah diupayakan untuk mengundang peserta sesuai target yang telah direncanakan.

Dokumentasi



2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Tabel. 17
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,21%	0,33 %	157,14%
			Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	100%	100%	100%
a.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlatihnya aparatur dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	150 org	116 org	77,33%
b.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	20 unit	20 unit	100%
c.	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemulihan rekonstruksi pasca bencana yang disusun	Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi pasca bencana yang disusun	1 Dok	1 Dok	100%
		Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi sektor terdampak pasca bencana	Jumlah dokumen pemulihan rekonstruksi pasca bencana yang disusun	1 Dok	1 Dok	100%
d.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota	Terlatihnya Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanganan bencana	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat	45 org	44 org	97,78%
e.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlatihnya warga negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	450 org	834 org	185,33%

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Dengan dasar pemikiran bahwa pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana.

Indikator kegiatan adalah (1) Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (2) Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun. *Adapun formulasinya adalah Jumlah aparatur dan warga negara yang berada di daerah rawan yang mengikuti pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi jumlah seluruh warga negara dan aparatur yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus.* Target dari indikator 1 adalah 0,21% (645 org) dan realisasi 0,33% (994 org) dengan persentase capaian kinerja 157,14%. Sedangkan target indikator 2 adalah 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian 100%. Pencapaian target kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota**

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan dengan target 150 orang dan realisasi 116 orang, persentase capaian kinerja 77,33%. Capaian kinerja tidak sesuai dengan target karena beberapa peserta tidak sempat hadir karena bertepatan dengan pelaksanaan beberapa kegiatan di akhir tahun. Berdasarkan anggaran kas sub kegiatan direncanakan pada Triwulan III karena adanya PPKM Level 4 maka kegiatan tersebut di tunda pelaksanaannya pada Triwulan IV. Disediakan anggaran sebesar Rp. 144.178.556,- dan terealisasi Rp. 128.714.150,- (89,27%). Terdapat sisa anggaran yang cukup besar yaitu Rp. 15.464.406,- karena jumlah peserta yang hadir hanya 116 orang dari 150 orang peserta yang diundang, sehingga mempengaruhi realisasi keuangan beberapa jenis belanja yang disediakan untuk peserta pelatihan. Namun telah diupayakan untuk mengundang peserta sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Dokumentasi



- **Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota**

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan dengan target 20 unit dan realisasi 20 unit, persentase capaian kinerja 100%. Adapun sarana dan prasarana yang diadakan yaitu pengadaan kantung jenazah. Disediakan anggaran sebesar Rp 9.000.000,- dan realisasi Rp 8.500.000,- (94,44%) dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp 500.000,- yang merupakan sisa belanja.

Dokumentasi



- **Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota**

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat dengan target 45 orang dan realisasi 44 orang, persentase capaian kinerja 97,78%. Jenis pelatihan yang diberikan adalah Teknik Penyelamatan di Air (Water Rescue) dengan instruktur dari BASARNAS (Koord. Pos SAR Unit Siaga Luwu Timur) dan Koord. Pos TNI AL Lampia. Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan ini direncanakan pelaksanaannya pada Triwulan II TA. 2021, namun pelaksanaannya ditunda sampai Triwulan III karena menyesuaikan waktu/kesediaan Narasumber dari BPBD Provinsi. Disediakan anggaran sebesar Rp. 85.784.820,- dan terealisasi Rp.68.059.200,- (79,34%). Terdapat sisa anggaran yang cukup besar yaitu Rp. 17.725.620,- karena jumlah peserta yang hadir hanya 44 orang dari target 45 org sehingga mempengaruhi realisasi belanja makan minum peserta, biaya sewa penginapan dan pengadaan baju peserta.

Dokumentasi



- **Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah warga negara yang ikut pelatihan dengan target 450 orang dan realisasi 834 orang dengan persentase capaian kinerja 185,33%. Realisasi Sub kegiatan ini terdiri dari Apel Siaga Bencana dengan jumlah peserta 450 org dan Simulasi dengan jumlah peserta 384 org. Jumlah peserta simulasi melebihi dari target karena guru-guru sangat antusias untuk menghadirkan murid-muridnya untuk

menghadiri kegiatan. Sedangkan jumlah peserta Apel Siaga Bencana bisa melebihi target karena adanya dukungan makanan dan minuman dari PT. Vale Indonesia dan dari Bank Sulselbar, sehingga jumlah peserta Apel yang diundang lebih dari yang direncanakan. Disediakan Anggaran sebesar Rp. 51.974.210,- dan terealisasi Rp 51.119.000,- (98,35%). Dalam pelaksanaan Apel Siaga Bencana, jumlah peserta yang direncanakan hanya 200, namun yang diundang sebanyak 450 org dengan adanya dukungan makanan dan minuman untuk peserta dari PT. Vale Indonesia dan Bank Sulselbar, sehingga anggaran yang tersedia cukup untuk membiayai kegiatan.

[Dokumentasi Apel Siaga bencana](#)



[Dokumentasi Simulasi Gempa](#)



- **Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota**

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang disusun dengan target 2 Dokumen dan realisasi 2 Dokumen, persentase capaian kinerja 100%. Dokumen tersebut berisi rekomendasi usulan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berdasarkan hasil identifikasi, dan akan diteruskan ke OPD terkait yang menangani ataupun dapat diusulkan ke BNPB (Dana Hibah RR) melalui proposal. Selain penanganan pasca bencana, hasil identifikasi juga diarahkan untuk penanganan mitigasi bencana untuk wilayah yang berpotensi bencana, sehingga dapat dilakukan pencegahan sedini mungkin. Disediakan anggaran sebesar Rp 343.889.975,- dan terealisasi Rp 282.072.994,- (82,02%). Realisasi keuangan terdiri dari belanja modal pekerjaan fisik Rp. 215.126.094,20, Belanja ATK Rp. 4.283.000,-, Belanja Perjalanan Biasa Rp. 62.663.900,-, sedangkan untuk Belanja Cetak dan Penggandaan tidak terealisasi disebabkan anggaran penggandaan menggunakan Administrasi Proyek pekerjaan fisik dan untuk jilid dilakukan sendiri dengan ATK yang tersedia dan untuk Belanja Makan dan Minum Rapat yang diperuntukkan untuk rapat-rapat koordinasi dengan OPD lain terkait penanganan sarana dan prasarana infrastruktur terdampak bencana juga tidak terealisasi karena tidak terdapat kejadian bencana yang memerlukan penanganan yang signifikan yang sifatnya lintas OPD.

3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Tabel. 18
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100%	100 %	100%
a.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	100%	100%
b.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	100%	100%

c.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	100%	100%	100%
d.	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	100%	100%	100%

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Penyelamatan dan evakuasi berfokus pada tindakan penyelamatan berupa pencarian atau perpindahan dari tempat kejadian bencana ke tempat yang lebih aman. Dengan dasar pemikiran bahwa keselamatan jiwa manusia sangat penting dalam proses penanganan darurat bencana maka untuk itu dibutuhkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin.

Kegiatan ini bertujuan untuk : (1) menemukan lokasi bencana, korban manusia, dan harta benda yang hilang atau dikhawatirkan akan hilang akibat bencana, (2) Menolong korban bencana yang sakit akibat bencana, (3) Menindahkan korban dari lokasi bencana ke tempat yang aman.

Indikator kegiatan adalah Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender dengan **Formulasi** : Jumlah korban bencana yang dicari, ditolong dan dievakuasi dibagi jumlah perkiraan korban bencana dikali seratus dengan target 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian kinerja 100% karena berdasarkan jumlah kejadian bencana pada tahun 2021, terdapat 250 korban terdampak, dan semuanya diberikan layanan penyelamatan dan evakuasi dan semua kejadian bencana yang terjadi, direspon kurang dari 24 jam untuk setiap kejadian bencana. Dari 178 kejadian terdapat 8 kejadian bencana yang mendapat penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, 153 kejadian (gempa bumi) dilakukan pengecekan data pada Sistem WRS (Warning Receiver System) dan dilaporkan ke pusat dan propinsi melalui PUSDALOPS BPBD. Cuaca ekstrim (angin kencang) 6 kejadian, Longsor 1 kejadian dan Kebakaran rumah 10 kejadian, difasilitasi dengan penyaluran bantuan logistik. Kegiatan ini sifatnya disediakan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kejadian bencana yang terjadi.

Pencapaian target Kegiatan ini didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota**

Indikator sub kegiatan adalah : Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana dengan target 100% dan realisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa semua kejadian bencana yang terjadi pada bulan Januari s.d Desember 2021 (178 kejadian) yaitu Banjir 2 kejadian, orang hilang/tenggelam 5 kejadian, kebakaran rumah 10 kejadian, kebakaran lahan 0 kejadian, cuaca ekstrim 6 kejadian, longsor 2 kejadian dan gempa bumi 153 kejadian dan semuanya direspon kurang dari 24 jam ketika laporan diterima dan dilakukan kaji cepat oleh Tim Reaksi Cepat BPBD. Disediakan anggaran sebesar Rp. 775.623.100,- dan terealisasi sebesar Rp 696.898.100,- atau sebesar 89,85 % dari pagu anggaran perubahan. Realisasi tidak sesuai dengan target karena terdapat 8 orang personil Tim Reaksi Cepat yang mengundurkan diri pada waktu yang berbeda dan terdapat juga 4 orang personil pengganti, sehingga berpengaruh terhadap realisasi belanja jasa (honor TRC) dan belanja makanan dan minuman aktifitas lapangan TRC.

Dokumentasi



- **Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota**

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana melalui pencarian dan penyelamatan, pertolongan darurat dan evakuasi korban bencana. Penyelamatan dan evakuasi berfokus pada tindakan penyelamatan berupa pencarian atau perpindahan dari tempat kejadian bencana ke tempat yang lebih aman

Indikator sub kegiatan adalah Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana dengan target 100% dan realisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana mulai bulan Januari s.d Desember 2021 sebanyak 250 jiwa (124 laki-laki dan 126 perempuan) dan semuanya diberikan layanan penyelamatan dan evakuasi. Disediakan anggaran sebesar Rp 100.130.000,- dengan realisasi Rp. 57.656.000,- atau sebesar 57,58 %. hal ini disebabkan karena hingga triwulan IV tidak terdapat kejadian bencana berskala besar dan membutuhkan pembiayaan yang signifikan. Anggaran ini sifatnya disediakan untuk mengantisipasi cuaca ekstrim diakhir tahun berdasarkan informasi kebencanaan yang ada.

Dokumentasi



- **Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota**

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana seperti hunian sementara (tenda), sandang, pangan, kebutuhan air bersih, kebutuhan sanitasi serta kebutuhan dasar lainnya

Indikator sub kegiatan adalah Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender dengan target 100% dan realisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana pada bulan Januari s.d Desember 2021 sebanyak 250 jiwa (124 laki-laki dan 126 perempuan), dari jumlah tersebut, sebanyak 242 jiwa yang memerlukan bantuan logistik sedangkan selebihnya (korban org hilang/tenggelam) hanya diberikan bantuan pertolongan dan evakuasi. Bantuan logistik yang diberikan berupa sandang pangan maupun hunian sementara (tenda). Disediakan anggaran sebesar Rp 160.491.078,- dengan realisasi keuangan Rp. 100.419.404,- atau sebesar 62,57 %. Terdapat sisa anggaran yang cukup besar yaitu belanja sandang pangan Rp 33.905.000,-, belanja paket pengiriman Rp 15.000.000, serta perjalanan dinas Rp 8.993.596,-. Faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi keuangan adalah tidak terdapat kejadian bencana yang membutuhkan pembiayaan yang signifikan dan terdapat bantuan logistik penanggulangan bencana dari BPBD Provinsi di Makassar yang telah diserahkan pada bulan agustus 2021. Jenis bantuan logistik yang diperoleh dari propinsi yaitu : Logistik Siaga Darurat 10 paket, sandang 5 paket, Paket Kesehatan Keluarga 5 paket, Family Kit 5 paket, Logistik Pangan (Beras, Mie Instan, Air Mineral, Minyak Goreng, Ikan Kaleng, Gula Pasir) 100 paket, Perlengkapan Keluarga (Sabun Mandi, Sikat gigi, Pasta gigi, Shampo, Handuk Kecil, Handuk Dewasa, Pembalut, Sarung, Minyak Kayu putih) 70 paket, Perlengkapan Bayi (Minyak telon, Popok, Bedak Bayi) 70 paket, Shelter Kit (Terpal, Selimut, Alas Tidur) 60 paket, Masker Medis 6000 pcs. Untuk belanja paket pengiriman tidak terealisasi karena disediakan untuk biaya pengiriman peralatan namun terkendala administrasi sehingga tidak realisasi sampai akhir tahun.

Dokumentasi Penyaluran Bantuan Logistik

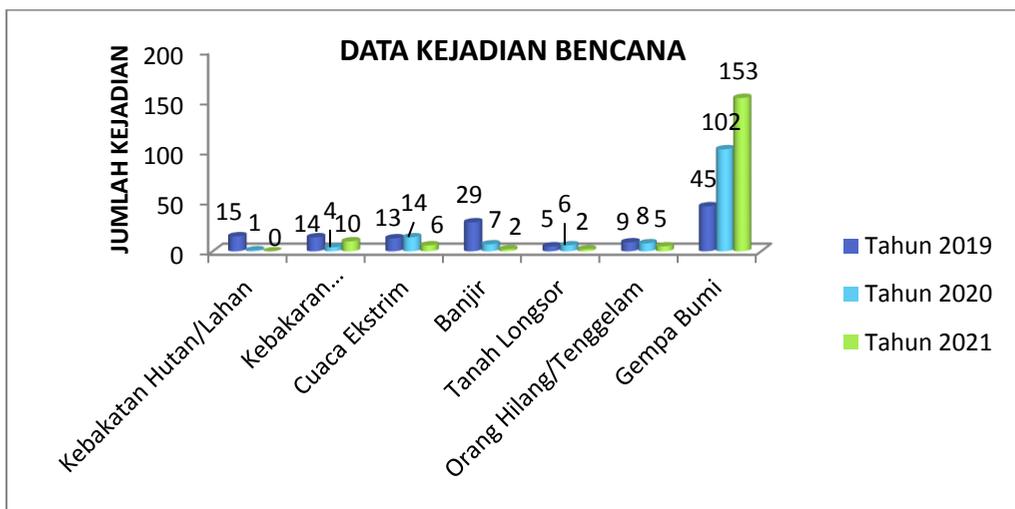


- **Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit**

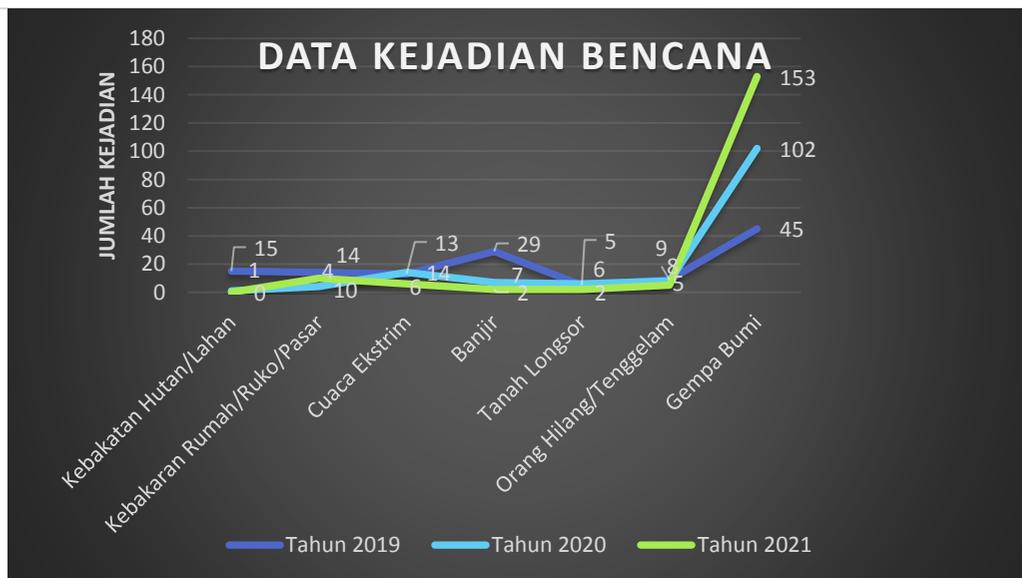
Indikator sub kegiatan adalah Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit dengan target 100% dan realisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa bencana non alam (covid-19) yang ditangani oleh BPBD terkait penyemprotan disinfektan di tempat-tempat strategis sesuai permintaan serta pemulasaran dan pemakaman jenazah covid-19, semuanya direspon kurang dari 24 jam. Adapun jumlah masyarakat yang terkonfirmasi covid-19 (meninggal) sebanyak 141 jiwa dan dilakukan respon cepat pemulasaran kurang dari 24 jam setiap informasi yang diterima oleh TRC BPBD. Disediakan anggaran sebesar Rp 169.948.818,- dengan realisasi anggaran Rp.160.260.100,-. atau sebesar 94,30%. Penggunaan anggaran yang cukup besar karena terjadi peningkatan jumlah korban meninggal terkonfirmasi Covid19 yang harus ditangani pada pertengahan tahun 2021 sampai awal bulan Desember 2021. Sisa anggaran sebesar Rp 9.688.718,- terdiri dari belanja ATK Rp 137.218,- belanja makan dan minum rapat Rp 5.250.000,- belanja makan dan minum aktifitas lapangan Rp 775.000,- dan belanja perjalanan dinas Rp 3.526.500,-. Belanja makan minum rapat tidak terealisasi karena kegiatan rapat terkait penanganan covid-19 dilakukan di Dinas Kesehatan (Satgas

Covid-19). sedangkan penggunaan anggaran belanja perjalanan dinas disesuaikan dengan kegiatan pemulasaran jenazah covid-19 dilapangan.

Dokumentasi Pemulasaran Jenazah Covid-19



Grafik. 7
Data Kejadian Bencana Tahun 2019-2021



Grafik. 8
Data Kejadian Bencana Tahun 2019-2021

SASARAN 2 (SASARAN PENDUKUNG)

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sasaran Pendukung “**Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah**” tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel. 19
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pendukung

Sasaran Pendukung :	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah			Notifikasi
	Tahun 2021			
Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95%	102,94%	108,36%	●

Keterangan : ● Mencapai/Melampui Target ; ● Belum Mencapai Target

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

❖ Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Indikator kinerja sasaran penunjang adalah Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan **formulasi indikator** yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah **“Jumlah capaian kinerja program dibagi target sasaran dikali seratus”**.

Target Indikator sasaran penunjang adalah 95% dan realisasi 102,94% dengan persentase capaian kinerja 108,35%. Persentase capaian kinerja melebihi dari target karena beberapa kegiatan yang mendukung capaian program, realisasinya > 100% sehingga bila diakumulasi maka akan menutupi kegiatan yang realisasinya <100%

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Adanya refocussing anggaran yang berdampak pada pengurangan target beberapa sub kegiatan, khususnya terkait pengadaan barang yang tidak sesuai dengan perencanaan dalam RKBMD.
- Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa
- Akibat penerapan PPKM, beberapa sub kegiatan ditunda pelaksanaannya dan baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun sehingga realisasi belanja yang tidak sesuai dengan anggaran kas yang telah direncanakan
- Terdapat beberapa jabatan struktural Eselon III dan IV yang masih kosong, mempengaruhi realisasi belanja gaji dan tunjangan
- Keterlambatan PPTK dalam merampungkan administrasi pertanggungjawaban keuangan
- Terdapat sub kegiatan yang sifatnya disediakan sehingga penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan
- Keterbatasan personil pengelola kegiatan/sub kegiatan

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- Menyusun RKBMD Perubahan dan menganggarkan kembali pada tahun berikutnya

- Melakukan koordinasi pejabat pengadaan dan PPK terkait percepatan proses pengadaan barang dan jasa
- Melakukan perhitungan kebutuhan gaji dan tunjangan pada perubahan anggaran
- Percepatan administrasi pertanggungjawaban keuangan
- Mencermati sub kegiatan yang sifatnya disediakan untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun
- Melakukan persuratan ke BKPSDM terkait kebutuhan pegawai

❖ **Efisiensi Anggaran**

Dalam pencapaian sasaran pendukung BPBD, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Efisiensi anggaran pada belanja modal pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang masih dapat ditunda pelaksanaannya dengan memaksimalkan peralatan yang ada.
- Efisiensi gaji dan tunjangan ASN
- Efisiensi belanja Bimtek
- Efisiensi pengadaan pakaian dinas
- Efisiensi anggaran perjalanan dinas luar daerah
- Efisiensi belanja listrik, telepon dan air kantor
- Efisiensi biaya pemeliharaan peralatan kantor

❖ **Efisiensi Sumber Daya**

- Terdapat beberapa jabatan struktural dan pelaksana yang masih kosong pada lingkup sekretariat, dan untuk mengakomodir semua pelaksanaan tugas, dilakukan rangkap jabatan sebagai pelaksana harian dan memaksimalkan upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas ASN.
- Terkait refocussing beberapa sarana dan prasarana kantor yang masih bisa ditunda pelaksanaannya, maka yang dilakukan adalah memaksimalkan peralatan yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN.

❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel. 20
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Pendukung	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95%	102,94%	108,36%	2.967.663.734,-	2.669.373.510,-	89,95%
Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	102,94%	108,36%	2.967.663.734,-	2.669.373.510,-	89,95%

Tabel. 21
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Pendukung	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	108,36%	89,95%	10,05%

Pencapaian sasaran pendukung Meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah sebesar 108,36% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 89,95%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 10,05%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

2. Perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun sebelumnya

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 22
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Pendukung	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah									Target Tahun 2026
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			
Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	97,92 %	97,92 %	100 %	101,87 %	101,87 %	95 %	102,94 %	108,36 %	100%

❖ Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Dilakukan perubahan target sub kegiatan pada saat perubahan anggaran
2. Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara periodik
4. Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja
5. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang
6. Melakukan evaluasi/monitoring terhadap pencapaian target Rencana Aksi Kinerja dan Perjanjian Kinerja

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Tabel. 23
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Jangka Menengah
(2021 - 2026)

Sasaran Pendukung :	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2021 terhadap target akhir Renstra 2026
	Realisasi			
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021	rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2021		
Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	102,94%	102,94%	100%	102,94%

Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung

Tabel. 24
Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2021	Target s.d TW 4	Realisasi s.d TW 4	Capaian (%)
I.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	95%	102,94 %	108,36%
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	100%	125%	125%
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100%

b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	3 Dok	150%
c.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	3 Dok	150%
d.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dok	10 Dok	10 Dok	100%
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	100%	89,47%	89,47%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjagannya	19 Org	19 Org	15 Org	78,95%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD n	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan dan akhir tahun dengan baik	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 Dok	18 Dok	18 Dok	100%
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar	100%	100%	100%	100%
a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100%	100%	125%	125%
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya untuk ASN dan upah jasa	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	18 Stel	18 Stel	18 Stel	100%
b.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10 Org	10 Org	15 Org	150%

5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	105,3%	105,3%
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	100%
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 Jenis	20 Jenis	19 Jenis	95%
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%
d.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	60 Expl	60 Expl	60 Expl	100%
e.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya makanan dan minuman untuk tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	275 Org	275 Org	272 Org	98,91%
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	58 Kali	58 Kali	80 Kali	137,93%
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100%	100%	85,71%	85,71%
a.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk kebutuhan kantor	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	7 Unit	7 Unit	6 Unit	85,71%
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	100%	99,86%	99,86%

a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik	Jumlah surat masuk dan keluar yang diagenda	500 Surat	500 Surat	498 Surat	99,60%
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor yang terbayarkan	36 Rek	36 Rek	36 Rek	100%
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Org	2 Org	2 Org	100%
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	100%	93,25%	93,25%
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 Unit	13 Unit	13 Unit	100%
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	79 Unit	79 Unit	63 Unit	79,75%
c.	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2Unit	100%

❖ **Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Indikator Program adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan **formulasi : jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan dikali seratus**. Target 95% dan realisasi 102,94% dengan capaian kinerja 108,36%, dan menyerap anggaran sebesar 89,95%. Capaian kinerja program yang melebihi target karena beberapa kegiatan capaiannya > 100% sehingga bila diakumulasi maka akan menutupi kegiatan yang realisasinya <100%. Hal ini disebabkan karena terdapat sub kegiatan yang seharusnya dilakukan perubahan target pada saat perubahan anggaran dan disamping itu terdapat pula sub kegiatan pada Triwulan IV intensitas pelaksanaannya meningkat seperti pelaksanaan Bimtek/pelatihan dan Rapat-rapat koordinasi dsb. Pencapaian Kinerja Program didukung oleh 8 kegiatan dan 22 sub kegiatan yaitu :

➤ **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 125%. Persentase capaian kinerja kegiatan melebihi dari target karena terdapat 2 sub kegiatan capaiannya > 100% yang seharusnya dilakukan perubahan target pada saat perubahan anggaran. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu, dengan target sebanyak 3 dokumen dan terealisasi 3 dokumen (100%). Adapun dokumen yang disusun adalah dokumen Renja Pokok Tahun 2022, Renja Perubahan 2021 dan Renstra BPBD 2021-2026. Disediakan anggaran sebesar Rp 22.315.263,- dan terelisasi Rp 20.277.000,-(90,87%). Sisa anggaran Rp 2.038.263,- terdiri dari, Belanja Cetak Rp 234.000 , makan dan minum rapat Rp 1.575.000, Belanja ATK Rp 119.263 serta perjalanan dinas luar daerah Rp 110.000. Tersisa Belanja makan dan minum rapat yang cukup besar karena beberapa agenda rapat yang direncanakan tidak terlaksana selama masa pandemi covid-19 karena aktifitas pemulasaran yang sangat tinggi sehingga sulit

mengumpulkan orang dalam waktu yang bersamaan sehingga beberapa agenda rapat yang direncanakan digabung dalam satu pelaksanaan rapat.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu, dengan target sebanyak 2 dokumen dan realisasi 3 dokumen (150%) yaitu penyusunan RKA Pergeseran dan RKA Perubahan 2021 serta RKA Pokok 2022. Realisasi yang melebihi target karena adanya refocusing anggaran sehingga dilakukan penyusunan RKA Pergeseran anggaran. Disediakan anggaran sebesar Rp 11.332.889,- dan terelisasi Rp 7.584.500,- (66,92%). Sisa anggaran Rp 3.748.389,- terdiri dari, Belanja Cetak Rp 85.400, makan dan minum rapat Rp 3.450.000 serta Belanja ATK Rp 213.889. Tersisa Belanja makan dan minum rapat yang cukup besar karena beberapa agenda rapat yang direncanakan tidak terlaksana selama masa pandemi covid-19 karena aktifitas pemulasaran yang sangat tinggi sehingga sulit mengumpulkan orang dalam waktu yang bersamaan sehingga beberapa agenda rapat yang direncanakan digabung dalam satu pelaksanaan rapat.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu, target sebanyak 2 dokumen dan realisasi 3 Dokumen dengan persentase capaian kinerja 150%, terdiri dari dokumen DPA-SKPD Tahun 2021 dan DPA Pergeseran Tahun 2021 serta DPA Perubahan Tahun 2021. Realisasi yang melebihi target karena adanya refocusing anggaran sehingga dilakukan penyusunan DPA Pergeseran anggaran. Disediakan anggaran sebesar Rp 8.004.079,- dan terelisasi Rp 6.039.400 (75,45%). Sisa anggaran Rp 1.964.679,- terdiri dari makan dan minum rapat Rp 1.550.000,- , Belanja ATK Rp 139.079 dan Belanja cetak Rp 275.600,-. Tersisa Belanja makan dan minum rapat yang cukup besar karena beberapa agenda rapat yang direncanakan tidak terlaksana selama masa pandemi covid-19 karena aktifitas pemulasaran yang sangat tinggi sehingga sulit mengumpulkan orang dalam waktu yang bersamaan sehingga beberapa agenda rapat yang direncanakan digabung dalam satu pelaksanaan rapat.

- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu, target sebanyak 10 dokumen dan realisasi 10 dokumen dengan persentase capaian kinerja 100% yaitu LPPD, LKPJ, LAKIP, Dokumen Evaluasi Kinerja TW 4 TA. 2020, Dokumen Evaluasi RKPD TW 1 TA. 2021 dan Evaluasi Kinerja TW 1 TA. 2021, Dokumen Evaluasi kinerja TW 2 TA. 2021, Dokumen Evaluasi RKPD TW 2 TA. 2021, Dokumen Evaluasi RKPD TW 3 TA. 2021 serta Dokumen Evaluasi Kinerja TW3 TA. 2021. Disediakan anggaran sebesar Rp 53.827.481,- dan terelisasi Rp 43.828.098,- (81,42%). Sisa anggaran sebesar Rp 9.999.383,- terdiri dari Belanja ATK Rp 314.481,- Belanja Cetak Rp 253.400 dan Belanja makan dan minum rapat Rp 8.150.000 serta perjalanan dinas luar daerah Rp 1.281.402. Tersisa Belanja makan dan minum rapat yang cukup besar karena beberapa agenda rapat yang direncanakan tidak terlaksana selama masa pandemi covid-19 karena aktifitas pemulasaran yang sangat tinggi sehingga sulit mengumpulkan orang dalam waktu yang bersamaan sehingga beberapa agenda rapat yang direncanakan digabung dalam satu pelaksanaan rapat.

Dokumentasi Money Internal



➤ **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Indikator kegiatan adalah persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 89,47% dengan persentase capaian kinerja 89,74%. Capaian kinerja yang tidak sesuai target karena dari 2 sub kegiatan yang dilaksanakan, salah satu sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan realisasinya hanya 78,95%, yang diakibatkan adanya beberapa jabatan struktural eselon III dan IV yang belum terisi personil serta mutasi staf. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan, target 19 org dan realisasi 15 org dengan persentase capaian kinerja 78,95 %. Hal ini disebabkan karena adanya jabatan struktural eselon III dan IV yang belum terisi. Disediakan anggaran sebesar Rp 1.914.900.589,- dan terelisasi Rp 1.695.089.814,- (88,52%). Adanya jabatan struktural yang masih kosong mempengaruhi realisasi gaji dan tunjangan.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu, target 18 dokumen dan realisasi 18 dokumen (100%) yaitu Laporan Bulanan Bendahara 12 Dokumen, Laporan Tahunan 1 Dokumen, LRA 1 Dokumen, Calk 1, Laporan Semester 1 dan 2 serta Laporan prognosis. Disediakan anggaran sebesar Rp 61.768.908,- dan terelisasi Rp 55.023.000,- (89,08%). Sisa anggaran Rp 6.745.908,- terdiri dari Belanja ATK Rp 80.908,-, Belanja Cetak Rp 565.000,-makan dan minum rapat Rp 3.875.000,- Honor tenaga administrasi Rp 1.000.000,- serta perjalanan dinas luar daerah Rp 1.225.000. Terdapat sisa belanja makan dan minum rapat yang cukup besar karena beberapa agenda rapat yang direncanakan tidak terlaksana selama masa pandemi covid-19 karena aktifitas pemulasaran yang sangat tinggi sehingga sulit mengumpulkan orang dalam waktu yang bersamaan sehingga beberapa agenda rapat yang direncanakan digabung dalam satu pelaksanaan rapat. Sedangkan honor tenaga administrasi tidak terealisasi selama 1 bulan karena adanya

penggantian staf administrasi baru yang pembayaran honorinya disesuaikan dengan SK.

➤ **Kegiatan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 100%. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh.

- **Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun, dengan target sebanyak 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen (100%). Dokumen yang disusun adalah Laporan penatausahaan BMD sebanyak 4 dokumen (TW I s.d TW IV). Disediakan anggaran sebesar Rp 19.999.400 dan realisasi Rp 18.525.000 (92,63%) Sisa anggaran sebesar Rp 1.474.400,- terdiri dari, Belanja ATK Rp 854.400,- Belanja Cetak Rp 240.000,- , dan Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 380.000,-. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dalam penyusunan laporan.

➤ **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 125% dengan persentase capaian kinerja 125%. Capaian kinerja melebihi dari target, karena dari 2 sub kegiatan yang dilaksanakan, salah satu sub kegiatan yaitu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, capaian kinerjanya 150%, hal ini disebabkan karena pada Triwulan IV, banyak kegiatan Bimtek/Pelatihan yang dilaksanakan oleh BPBD Propinsi maupun oleh Daerah. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan, dengan target 18 stel dan realisasi 18 stel (100%). Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan ini direncanakan pada Triwulan II TA. 2021 namun baru terealisasi pada triwulan III TA. 2021. Hal ini disebabkan karena PPTK terkendala bentuk pertanggungjawaban (SPJ)

untuk belanja barang dan jasa pengadaan baju dinas sehingga dilakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pejabat pengadaan, disamping itu banyaknya OPD yang melakukan pemesanan pakaian dinas ditempat yang sama. Adapun pengadaannya terdiri Baju PSR eselon II 1 stel, PSR eselon III 3 stel, Baju PDH eselon IV 7 stel dan Baju PDH staf/upah jasa 7 stel. Disediakan anggaran sebesar Rp 15.350.000,- dan realisasi 100%.

- **Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan, dengan target sebanyak 10 org dan realisasi 15 orang (150%) yaitu Pelatihan resiko zoonosis berpotensi wabah 1 org, Pelatihan teknis sistem komando penanganan darurat bencana 2 org, Workshop RPB 1 org, pelatihan mitigasi dan sosialisasi KIE 1 org, Bimtek pengelolaan BMD 1 org, Bimtek penguatan SAKIP 2 org, Bimtek Pengelolaan arsip dinamis 1 org, Pelatihan manaj.posko tanggap darurat bencana 2 org, Pelatihan manaj. Logistik 1 org, Revolusi mental 1 org, Bimtek inovasi pelayanan publik 2 org. Capaian kinerja melebihi dari target yaitu sebesar 150%, hal ini disebabkan karena pada Triwulan IV, banyak kegiatan Bimtek/Pelatihan yang dilaksanakan oleh BPBD Propinsi maupun oleh Daerah yang merupakan dampak dari pemberlakuan PPKM Level 2 dimana beberapa aktifitas/kegiatan sudah dapat dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Disediakan anggaran sebesar Rp 57.100.000,- dan realisasi Rp 50.023.150,- (87,61%). Sisa anggaran sebesar Rp 7.076.850,- terdiri dari Belanja Bimtek Rp 4.500.000,- dan Belanja perjalanan dinas Rp 2.576.850,-. Realisasi keuangan tidak sesuai dengan target karena Berdasarkan SBM, besaran untuk belanja bimtek/orang sebesar Rp 5.000.000, namun pada pelaksanaan beberapa bimtek yang diikuti, biaya kontribusi lebih rendah dari SBM sehingga terdapat sisa belanja. Begitu juga dengan belanja perjalanan dinas, beberapa kegiatan pelatihan yang diikuti ditanggung akomodasi dan konsumsi oleh Panitia penyelenggara sehingga besaran perjalanan dinas yang dibayarkan dibawah dari besaran perjalanan dinas dalam Standar Biaya Masukan. Dan pada dasarnya penggunaan anggaran disesuaikan dengan undangan pemanggilan peserta.

➤ **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 105,3% dengan persentase capaian kinerja 105,3%. Capaian kinerja melebihi dari target karena dari 6 sub kegiatan yang dilaksanakan, salah satu sub kegiatan yaitu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, capaian kinerjanya 137,93%, dan capaian tersebut berpengaruh terhadap capaian kinerja kegiatan secara keseluruhan. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan, target 8 jenis, dan terealisasi 8 jenis (100%). Adapun komponen alat listrik yang disediakan yaitu Kabel, steker, terminal, balon lampu, Lampu sorot, pitting lampu dan trafo. Kebutuhan alat listrik disesuaikan dengan kebutuhan kantor. Disediakan anggaran sebesar Rp 17.440.000,- dan terealisasi Rp 16.970.000,- (97,31%). Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan, target 20 jenis dan realisasi 19 jenis (95%) terdiri dari BBM operasional, Oli pelumas dan 17 jenis alat dan bahan kebersihan. Dan disediakan anggaran sebesar Rp 29.349.250,- dan terealisasi Rp 27.930.500,- (95,17%). Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan, target 3 jenis setiap triwulan dan realisasi 3 jenis (100%) terdiri dari penggandaan, cetak dan jilid. Dan disediakan anggaran sebesar Rp 47.625.000,- dan terealisasi Rp 36.881.000,- (77,44%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 10.744.000,- Realisasi keuangan tidak sesuai dengan target karena disediakan untuk belanja cetak baliho untuk peringatan hari-hari tertentu di Kab. Luwu Timur namun tidak dapat terealisasi.

Dokumentasi Baliho peringatan dini bencana



- **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan, target 60 ekpl dan terealisasi 60 ekpl dengan capaian kinerja 100%, terdiri dari Koran lokal 12 expl, Koran Nasional 12 expl dan Koran Regional 36 expl. Disediakan anggaran sebesar Rp 6.120.000,- dan terealisasi Rp 6.120.000,- (100%).

- **Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah tamu yang difasilitasi, dengan target sebanyak 275 org dan terealisasi 272 org dengan capaian kinerja 98,91%. Dan disediakan anggaran sebesar Rp 12.375.000,- dan terealisasi Rp 12.047.000,- (97,35%).

- **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti, target sebanyak 58 kali dan terealisasi 80 kali dengan capaian kinerja 137,93%. Capaian yang melebihi dari target disebabkan terdapat beberapa kegiatan urgen yang perlu dikoordinasikan dengan pihak terkait. Disamping itu beberapa undangan/kegiatan rakor yang pembiayaannya ditanggung oleh pihak penyelenggara sehingga terdapat biaya seperti biaya akomodasi dan transport tidak dibayarkan melalui APBD sehingga anggaran dapat digunakan lebih dari target yang direncanakan. Disediakan anggaran sebesar Rp 395.153.400,- dan terealisasi Rp 393.557.450,- (99,60%).

➤ **Kegiatan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 85,71% dengan persentase capaian kinerja 85,71%. Capaian kinerja tidak sesuai dengan target karena dari 7 unit peralatan dan mesin yang direncanakan, terealisasi hanya 6 unit. Hal ini disebabkan adanya 1 unit pengadaan barang yang spesifikasi yang termuat dalam DPA-SKPD dan tidak terdapat dipasaran. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan, target 7 unit dan terealisasi 6 unit (85,71%) yaitu Pengadaan Laptop 1 unit, Printer 2 unit, Scanner 1 unit dan Kursi kerja eselon IV 2 unit. Sedangkan lemari arsip tidak terealisasi karena spesifikasi yang diinginkan sesuai yang tercantum dalam DPA tidak terdapat dipasaran. Disediakan anggaran Rp 45.647.000,- dan realisasi Rp 37.875.000 (82,97%) terdapat sisa anggaran sebesar Rp 7.772.000,- terdiri dari belanja lemari arsip Rp 4.947.000,- dan sisa belanja kursi sebesar Rp 2.200.000.



➤ **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 99,86% dengan persentase capaian kinerja 99,86%. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan, target 500 surat dan terealisasi 498 surat dengan persentase capaian kinerja 99,6%. Terdiri dari 359 surat masuk dan 139 surat keluar. Disediakan anggaran sebesar Rp 4.195.475,- dan realisasi Rp 3.740.500 (89,16%) terdapat sisa anggaran sebesar Rp 454.975,- terdiri dari belanja ATK Rp 294.975,- dan paket pengiriman Rp 160.000,-. Penggunaan anggaran untuk belanja paket pengiriman dan ATK disesuaikan dengan kebutuhan kantor.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan, target sebanyak 36 rekening dan realisasi 36 rekening dan terealisasi 36 rekening dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian tersebut karena dilakukan penyesuaian target pada saat perubahan anggaran. Disediakan anggaran sebesar Rp 52.500.000,- dan realisasi Rp 44.348.254 (84,47%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 8.151.746,- terdiri dari belanja Listrik Rp 6.840.746,-, belanja air Rp 631.000 dan belanja telepon Rp 680.000. Realisasi keuangan kurang dari 100% karena rendahnya pemakaian air kantor selama beberapa bulan. Disamping itu rekening telepon (Nomor ON CALL) yang terblokir, baru terbayarkan pada bulan Desember 2021. Dan terdapat penurunan pemakaian listrik selama beberapa bulan.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan, target 2 orang dan realisasi 2 orang (100%) yaitu terbayarnya honor upah jasa cleaning service dan pejabat pengadaan. Disediakan anggaran sebesar Rp 19.800.000,- dan Realisasi Rp

19.800.000 (100%). Anggaran digunakan untuk pembayaran honor pejabat pengadaan dan cleaning service selama 12 bulan.

➤ **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 93,25% dengan persentase capaian kinerja 93,25%. Capaian kinerja tidak sesuai dengan target karena dari 3 sub kegiatan pengampuh, terdapat 1 sub kegiatan yaitu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya capain kinerjanya hanya 79,75%. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa peralatan kantor dan peralatan bencana yang disediakan anggaran pemeliharaannya, masih dalam kondisi baik. Sehingga penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi peralatan. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara, target 13 unit dan realisasi 13 unit dengan persentase capaian kinerja 100%. Adapun kendaraan dinas yang dipelihara yaitu Motor 7 unit, Mobil Truk Serbaguna 1 unit, Double Cabin 2 unit, Mobil wtertreatment 1 unit dan mobil Operasional TRC 1 unit. Disediakan anggaran sebesar Rp. 99.850.000,- dan realisasi Rp. 98.554.844,- (98,70%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.295.156,-. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi kendaraan dinas yang mengalami kerusakan.

- **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, target sebanyak 79 unit dan terealisasi 63 unit dengan persentase capaian kinerja 79,75%. Realisasi yang tidak sesuai target karena beberapa peralatan kantor dan peralatan bencana yang disediakan anggaran pemeliharaannya, masih dalam kondisi baik. Disediakan anggaran sebesar Rp. 43.010.000,- dan realisasi Rp. 30.295.000,- (70,44%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 12.715.000,-. Pada dasarnya penggunaan anggaran pemeliharaan disesuaikan dengan kondisi peralatan yang memerlukan perbaikan.

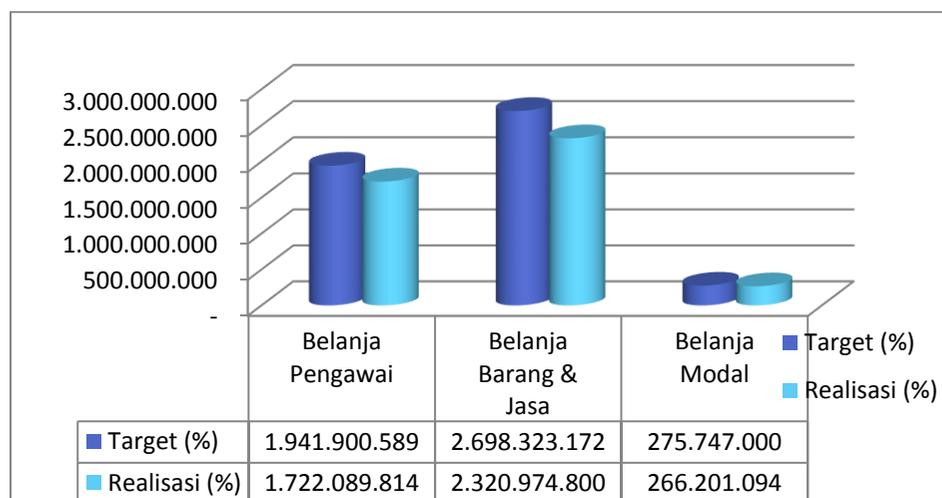
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi, target 2 unit dan realisasi 2 unit (100%). Adapun pekerjaan yang dilakukan adalah Perbaikan lantai Posko (Rabat beton) serta pengecatan gedung kantor BPBD dan Gudang Logistik serta pagar. Disediakan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dan realisasi Rp. 29.514.000,- (98,38%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 486.000,-. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan perbaikan gedung kantor BPBD dan gudang logistik.

3.3 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan serta analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Anggaran APBD Perubahan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 adalah sebesar sebesar **Rp. 4.915.970.761,-** (*Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*), terdiri dari belanja pegawai **Rp 1.941.900.589,-** belanja barang dan jasa **Rp. 2.698.323.172,-** dan belanja modal **Rp 275.747.000,-**. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 2 program, 11 kegiatan serta 32 sub kegiatan. Dan realisasi belanja dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 9. Realisasi Anggaran Tahun 2021

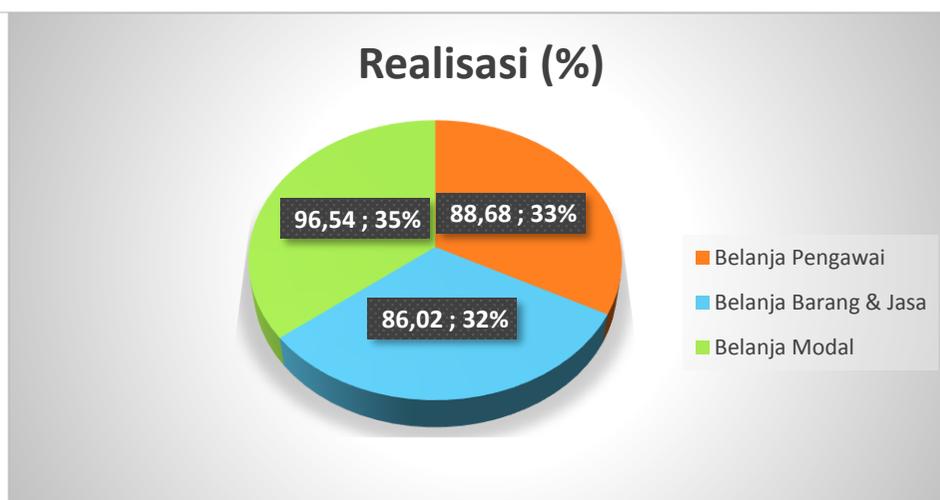


Diagram.1 Persentase Serapan Anggaran Tahun 2021

Tabel. 25
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021

No	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Target			Realisasi	%
		Pagu	Realisasi	(%)	Indikator Program/Kegiatan	Targ et	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				(4/3*100)					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4,915,970,761	4,309,265,708	87.66					
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	2,967,663,734	2,669,373,510	89.95	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95	%	102.94	108.36
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95,479,712	77,728,998	81.41	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100	%	125	125.00
1	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22,315,263	20,277,000	90.87	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	3	Dokumen	3	100.00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11,332,889	7,584,500	66.92	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	2	Dokumen	3	150.00

3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8,004,079	6,039,400	75.45	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat waktu	2	Dokumen	3	150.00
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53,827,481	43,828,098	81.42	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10	Dokumen	10	100.00
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,976,669,497	1,750,112,814	88.54	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100	%	89.47	89.47
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,914,900,589	1,695,089,814	88.52	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	19	orang	15	78.95
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	61,768,908	55,023,000	89.08	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	18	Dokumen	18	100.00
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	19,999,400	18,525,000	92.63	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100	%	100	100.00
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19,999,400	18,525,000	92.63	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4	Dokumen	4	100.00
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72,450,000	65,373,150	90.23	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	125	125.00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15,350,000	15,350,000	100.00	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	18	stel	18	100.00
2	Bimbingan Teknis Implementasi	57,100,000	50,023,150	87.61	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	10	orang	15	150.00
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	508,062,650	493,505,950	97.13	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	100	%	105.3	105.30
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17,440,000	16,970,000	97.31	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	8	jenis	8	100.00
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29,349,250	27,930,500	95.17	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20	jenis	19	95.00

3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47,625,000	36,881,000	77.44	Jumlah Barang cetak dan/atau penggandaan yang disediakan	3	jenis	3	100.00
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,120,000	6,120,000	100.00	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	expl	60	100.00
5	Fasilitas Kunjungan Tamu	12,375,000	12,047,000	97.35	Jumlah tamu yang difasilitasi	275	orang	272	98.91
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	395,153,400	393,557,450	99.60	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	58	kali	80.00	137.93
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45,647,000	37,875,000	82.97	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100	%	85.71	85.71
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45,647,000	37,875,000	82.97	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	7	unit	6	85.71
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76,495,475	67,888,754	88.75	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	99.86	99.86
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,195,475	3,740,500	89.16	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	500	surat	498	99.60
2	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52,500,000	44,348,254	84.47	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	36	rekening	36	100.00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19,800,000	19,800,000	100.00	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	2	orang	2	100.00
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	172,860,000	158,363,844	91.61	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100	%	93.25	93.25
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99,850,000	98,554,844	98.70	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara	13	unit	13	100.00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43,010,000	30,295,000	70.44	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	79	unit	63	79.75
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30,000,000	29,514,000	98.38	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	unit	2	100.00

B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1,948,307,027	1,639,892,198	84.17	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%	88.23	88.23
					Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%	100	100.00
					Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100	%	100	100.00
IX	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	107,286,470	86,193,250	80.34	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0.10	%	0.093	93.00
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	107,286,470	86,193,250	80.34	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	300	orang	280	93.33
X	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	634,827,561	538,465,344	84.82	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0.21	%	0.33	157.14
					Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	100	%	100	%
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	144,178,556	128,714,150	89.27	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	150	orang	116	77.33
2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	9,000,000	8,500,000	94.44	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	20	unit	20	100.00
3	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	343,889,975	282,072,994	82.02	Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi pasca bencana yang disusun	1	Dokumen	1	100.00
					Jumlah dokumen pemulihan rekonstruksi pasca bencana yang disusun	1	Dokumen	1	100.00

4	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	85,784,820	68,059,200	79.34	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat	45	orang	44	97.78
5	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	51,974,210	51,119,000	98.35	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	450	orang	834	185.33
XI	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1,206,192,996	1,015,233,604	84.17	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100	%	100	%
1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	775,623,100	696,898,100	89.85	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)	100	%	100	100.00
2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100,130,000	57,656,000	57.58	Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	%	100	100.00
3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	160,491,078	100,419,404	62.57	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	100	%	100	100.00
4	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	169,948,818	160,260,100	94.30	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	100	%	100	100.00
TOTAL		4,915,970,761	4,309,265,708	87.66					

❖ Permasalahan dan Solusi terkait Penyerapan Anggaran

Tabel.26
Permasalahan dan Solusi

KODE KEGIATAN					PROGRAM/KEGIATAN	PERMASALAHAN TERKAIT PENCAPAIAN KINERJA (SECARA TEKNIS BAIK FAKTOR INTERNAL MAUPUN FAKTOR EKSTERNAL)	PERMASALAHAN TERKAIT REALISASI KEUANGAN	SOLUSI
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			-
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	05	01	2.01	01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Target kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu, dengan target sebanyak 3 dokumen. Dan terealisasi 100%. Adapun dokumen yang disusun adalah dokumen Renja Pokok Tahun 2022, Renja Perubahan 2021 dan Renstra BPBD 2021-2026.	Disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 22.315.263,- dan terelisasi Rp 20.277.000,-(90,87%). Sisa anggaran sebesar Rp 2.038.263,- terdiri dari, Belanja Cetak Rp 234.000 , makan dan minum rapat Rp 1.575.000, Belanja ATK Rp 119.263 serta perjalanan dinas luar daerah Rp 110.000. Tersisa Belanja makan dan minum rapat yang cukup besar karena beberapa agenda rapat yang direncanakan tidak terlaksana selama masa pandemi covid-19 karena aktifitas pemulasaran yang sangat tinggi sehingga sulit mengumpulkan orang dalam waktu yang bersamaan sehingga beberapa agenda rapat yang direncanakan digabung dalam satu pelaksanaan rapat..	Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.

1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Target kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu, dengan target sebanyak 2 dokumen. Target kinerja direncanakan s.d Triwulan IV yaitu 2 dokumen dan terealisasi 3 dokumen (150%) yaitu penyusunan RKA Pergeseran dan RKA Perubahan 2021 serta RKA Pokok 2022. Realisasi yang melebihi target karena adanya refocusing anggaran sehingga dilakukan penyusunan RKA Pergeseran anggaran.	Disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 11.332.889,- dan terelisasi Rp 7.584.500,- (66,92%). Sisa anggaran sebesar Rp 3.748.389,- terdiri dari, Belanja Cetak Rp 85.400, makan dan minum rapat Rp 3.450.000 serta Belanja ATK Rp 213.889. Tersisa Belanja makan dan minum rapat yang cukup besar karena beberapa agenda rapat yang direncanakan tidak terlaksana selama masa pandemi covid-19 karena aktifitas pemulasaran yang sangat tinggi sehingga sulit mengumpulkan orang dalam waktu yang bersamaan sehingga beberapa agenda rapat yang direncanakan digabung dalam satu pelaksanaan rapat.	Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Target kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu, dengan target sebanyak 2 dokumen. Adapun realisasi s.d Triwulan IV yaitu 3 Dokumen (150%) yaitu dokumen DPA-SKPD Tahun 2021 dan DPA Pergeseran Tahun 2021 serta DPA Perubahan 2021. Realisasi yang melebihi target karena adanya refocusing anggaran sehingga dilakukan penyusunan DPA Pergeseran anggaran.	Disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 8.004.079,- dan terelisasi Rp 6.039.400 (75,45%). Sisa anggaran sebesar Rp 1.964.679,- terdiri dari makan dan minum rapat Rp 1.550.000,-, Belanja ATK Rp 139.079 dan Belanja cetak Rp 275.600,-. Tersisa Belanja makan dan minum rapat yang cukup besar karena beberapa agenda rapat yang direncanakan tidak terlaksana selama masa pandemi covid-19 karena aktifitas pemulasaran yang sangat tinggi sehingga sulit mengumpulkan orang dalam waktu yang bersamaan sehingga beberapa agenda rapat yang direncanakan digabung dalam satu pelaksanaan rapat.	Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu, dengan target sebanyak 10 dokumen. Adapun realisasi s.d triwulan IV yaitu tersusunnya 10 dokumen (100%) yaitu LPPD, LKPJ, LAKIP, Dokumen Evaluasi Kinerja TW 4 TA. 2020, Dokumen Evaluasi RKPW TW 1 TA. 2021 dan Evaluasi Kinerja TW 1 TA. 2021, Dokumen Evaluasi kinerja TW 2 TA. 2021, Dokumen Evaluasi RKPW TW 2 TA. 2021, Dokumen Evaluasi RKPW TW 3 TA. 2021 serta Dokumen Evaluasi Kinerja TW3 TA. 2021.	Disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 53.827.481,- dan terelisasi Rp 43.828.098,-(81,42%). Sisa anggaran sebesar Rp 9.999.383,- terdiri dari Belanja ATK Rp 314.481,- Belanja Cetak Rp 253.400 dan Belanja makan dan minum rapat Rp 8.150.000 serta perjalanan dinas luar daerah Rp 1.281.402. Tersisa Belanja makan dan minum rapat yang cukup besar karena beberapa agenda rapat yang direncanakan tidak terlaksana selama masa pandemi covid-19 karena aktifitas pemulasaran yang sangat tinggi sehingga sulit mengumpulkan orang dalam waktu yang bersamaan sehingga beberapa agenda rapat yang direncanakan digabung dalam satu pelaksanaan rapat.	Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			

1	05	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan, dengan target sebanyak 19 org setiap triwulannya. Adapun realisasinya hanya 15 org sehingga capaian hanya 78,95 %. Hal ini disebabkan karena adanya jabatan struktural eselon III dan IV yang belum terisi .	Disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 1.914.900.589,- dan terelisasi Rp 1.695.089.814,- (88,52%). Terdapat sisa anggaran yang cukup besar karena beberapa jabatan struktural eselon III dan IV yang masih kosong sehingga mempengaruhi realisasi gaji dan tunjangan	Untuk mencermati penyediaan gaji dan tunjangan pada perubahan anggaran
1	05	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu, dengan target sebanyak 18 dokumen. Adapun Realisasi s.d triwulan IV TA. 2021 yaitu tersusunnya 18 dokumen (100%) yaitu Laporan Bulanan Bendahara 12 Dokumen, Laporan Tahunan 1 Dokumen, LRA 1 Dokumen, Calk 1, Laporan Semester 1 dan 2 serta Laporan prognosis.	Disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 61.768.908,- dan terelisasi Rp 55.023.000,- (89,08%). Sisa anggaran sebesar Rp 6.745.908,- terdiri dari Belanja ATK Rp 80.908,-, Belanja Cetak Rp 565.000,-, makan dan minum rapat Rp 3.875.000,- Honor tenaga administrasi Rp 1.000.000,- serta perjalanan dinas luar daerah Rp 1.225.000. Tersisa Belanja makan dan minum rapat yang cukup besar karena beberapa agenda rapat yang direncanakan tidak terlaksana selama masa pandemi covid-19 karena aktifitas pemulasaran yang sangat tinggi sehingga sulit mengumpulkan orang dalam waktu yang bersamaan sehingga beberapa agenda rapat yang direncanakan digabung dalam satu pelaksanaan rapat. Sedangkan honor tenaga administrasi tidak terealisasi selama 1 bulan karena adanya penggantian staf administrasi baru yang pembayaran honorinya disesuaikan dengan SK.	Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD			
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun, dengan target sebanyak 4 dokumen. Adapun realisasi s.d triwulan IV TA. 2021 yaitu tersusunnya Laporan penatausahaan BMD sebanyak 4 dokumen dan terealisasi 100%	Disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 19.999.400 dan realisasi Rp 18.525.000 (92,63%) Sisa anggaran sebesar Rp 1.474.400,- terdiri dari, Belanja ATK Rp 854.400,- Belanja Cetak Rp 240.000,- , dan Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 380.000,-.	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			

1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan, dengan target sebanyak 18 stel. Berdasarkan anggaran kas Pengadaan belanja barang dan jasa (pengadaan baju dinas & perlengkapannya) direncanakan pada Triwulan II TA. 2021 namun baru terealisasi pada triwulan III TA. 2021 yaitu sebanyak 18 stel. Hal ini disebabkan karena PPTK terkendala bentuk pertanggungjawaban (SPJU) untuk belanja barang dan jasa pengadaan baju dinas sehingga dilakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pejabat pengadaan, disamping itu banyaknya OPD yang melakukan pemesanan pakaian dinas ditempat yang sama.	Disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 15.350.000,- dan realisasi 100%.	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi	Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan, dengan target sebanyak 10 org. Adapun realisasi s.d triwulan IV TA. 2021 yaitu Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sebanyak 15 orang (150%) yaitu Pelatihan resiko zoonosis berpotensi wabah 1 org, Pelatihan teknis sistem komando penanganan darurat bencana 2 org, Workshop RPB 1 org, pelatihan mitigasi dan sosialisasi KIE 1 org, Bimtek pengelolaan BMD 1 org, Bimtek penguatan SAKIP 2 org, Bimtek Pengelolaan arsip dinamis 1 org, Pelatihan manaj.posko tanggap darurat bencana 2 org, Pelatihan manaj. Logistik 1 org, Revolusi mental 1 org, Bimtek inovasi pelayanan publik 2 org.	Disediakan anggaran sebesar Rp 57.100.000,- dan realisasi Rp 50.023.150,- (87,61%). Sisa anggaran sebesar Rp 7.076.850,- terdiri dari Belanja Bimtek Rp 4.500.000,- dan Belanja perjalanan dinas Rp 2.576.850,-. Realisasi keuangan tidak sesuai dengan target karena penggunaan anggaran disesuaikan dengan undangan pemanggilan peserta untuk bimtek maupun pelatihan.	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			

1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan, dengan target sebanyak 8 jenis, dan terealisasi 8 jenis (100%). Adapun komponen alat listrik yang disediakan yaitu Kabel, steker, terminal, balon lampu, Lampu sorot, pitting lampu dan trafo. Kebutuhan alat listrik disesuaikan dengan kebutuhan kantor.	Dan disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 17.440.000,- dan terealisasi Rp 16.970.000,- (97,31%). Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan, dengan target 20 jenis. Adapun realisasi s.d triwulan IV TA. 2021 yaitu 19 jenis yaitu BBM operasional, Oli pelumas dan 17 jenis alat dan bahan kebersihan dengan persentase capaian kinerja 95%. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor	Dan disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 29.349.250,- dan terealisasi Rp 27.930.500,- (95,17%). Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan, dengan target 3 jenis setiap triwulan. Adapun realisasi s.d triwulan IV TA. 2021 yaitu 3 jenis terdiri dari penggandaan, cetak dan jilid dan terealisasi 100%	Dan disediakan anggaran s.d triwulan VI sebesar Rp 47.625.000,- dan terealisasi Rp 36.881.000,- (77,44%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 10.744.000,- Realisasi keuangan tidak sesuai dengan target karena disediakan untuk belanja cetak baliho untuk peringatan hari-hari tertentu di Kab. Luwu Timur namun tidak dapat terealisasi.	Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan, dengan target 60 exp dan terealisasi 60 ekpl dengan capaian kinerja 100% terdiri dari Koran lokal 12 expl, Koran Nasional 12 expl dan Koran Regional 36 expl	Dan disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 6.120.000,- dan terealisasi Rp 6.120.000,- (100%).	
1	05	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah tamu yang difasilitasi, dengan target sebanyak 275 org dan terealisasi 272 org dengan capaian kinerja 98,91%	Dan disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 12.375.000,- dan terealisasi Rp 12.047.000,- (97,35%).	

1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti, dengan target sebanyak 58 kali. Adapun target s.d triwulan IV TA. 2021 yaitu 58 kali, dan terealisasi 80 kali dengan capaian kinerja 137,93%. Capaian yang melebihi dari target disebabkan terdapat beberapa kegiatan urgen yang perlu dikoordinasikan dengan pihak terkait. terdapat beberapa undangan/kegiatan rakor yang pembiayaannya ditanggung oleh pihak penyelenggara sehingga terdapat biaya seperti biaya akomodasi dan transport tidak dibayarkan melalui APBD sehingga anggaran dapat digunakan lebih dari target yang direncanakan	Dan disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 395.153.400,- dan terealisasi Rp 393.557.450,- (99,60%).	Agar PPTK mencermati perubahan target pada saat perubahan anggaran.
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan, sebanyak 7 unit dan terealisasi 6 unit (85,71%) yaitu Pengadaan Laptop 1 unit, Printer 2 unit, Scanner 1 unit dan Kursi kerja eselon IV 2 unit. Sedangkan lemari arsip tidak terealisasi karena spesifikasi yang diinginkan sesuai yang tercantum dalam DPA tidak terdapat dipasaran.	Disediakan anggaran s.d Triwulan IV Rp 45.647.000,- dan realisasi Rp 37.875.000 (82,97%) terdapat sisa anggaran sebesar Rp 7.772.000,- terdiri dari belanja lemari arsip Rp 4.947.000,- dan sisa belanja kursi sebesar Rp 2.200.000.	Kedepannya agar PPTK mencermati spesifikasi yang seharusnya tidak termuat dalam DPA
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan, dengan target sebanyak 500 surat. Adapun target s.d triwulan IV sebanyak 500 surat dan terealisasi 498 surat dengan persentase capaian kinerja 99,6%. Terdiri dari 359 surat masuk dan 139 surat keluar.	Disediakan anggaran s.d Triwulan IV Rp 4.195.475,- dan realisasi Rp 3.740.500 (89,16%) terdapat sisa anggaran sebesar Rp 454.975,- terdiri dari belanja ATK Rp 294.975,- dan paket pengiriman Rp 160.000,-. Penggunaan anggaran untuk belanja paket pengiriman dan ATK disesuaikan dengan kebutuhan kantor.	Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.

1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan, dengan target sebanyak 36 rekening. Adapun target s.d triwulan IV TA. 2021 yaitu sebanyak 36 rekening dan terealisasi 36 rekening dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian tersebut karena dilakukan penyesuaian target pada saat perubahan anggaran.	Disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 52.500.000,- dan realisasi Rp 44.348.254 (84,47%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 8.151.746,- terdiri dari belanja Listrik Rp 6.840.746,-, belanja air Rp 631.000 dan belanja telepon Rp 680.000. Realisasi keuangan kurang dari 100% karena rendahnya pemakaian air kantor selama beberapa bulan. Disamping itu rekening telepon (Nomor ON CALL) yang terblokir, baru terbayarkan pada bulan Desember 2021. Dan terdapat penurunan pemakaian listrik selama beberapa bulan.	Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan, dengan target 2 org. Adapun realisasi s.d triwulan IV TA. 2021 yaitu terbayarnya honor tenaga pelayanan umum kantor sebanyak 2 org yaitu cleaning service dan pejabat pengadaan, dan terealisasi 100%	Disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 19.800.000,- dan Realisasi Rp 19.800.000 (100%). Anggaran digunakan untuk pembayaran honor pejabat pengadaan dan cleaning service selama 12 bulan.	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah			
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara, dengan target 13 unit setiap triwulannya. Adapun realisasi s.d triwulan III TA. 2021 yaitu 13 unit, dengan persentase capaian kinerja 100%. Adapun kendaraan dinas yang dipelihara yaitu Motor 7 unit, Mobil Truk Serbaguna 1 unit, Double Cabin 2 unit, Mobil wtertreatment 1 unit dan mobil Operasional TRC 1 unit. Pada dasarnya pemeliharaan kendaraan ini hanya dilakukan untuk kendaraan dinas yang mengalami kerusakan.	Disediakan anggaran kas pada triwulan IV sebesar Rp. 99.850.000,- dan realisasi Rp. 98.554.844,- (98,70%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.295.156,-. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi kendaraan dinas yang mengalami kerusakan	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, dengan target sebanyak 79 unit. Adapun target s.d triwulan IV TA. 2021 sebanyak 79 unit dan terealisasi 63 unit, dengan persentase capaian kinerja 79,75%. Pemeliharaan peralatan disesuaikan dengan kondisi peralatan.	Disediakan anggaran kas pada triwulan IV sebesar Rp. 43.010.000,- dan realisasi Rp. 30.295.000,- (70,44%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 12.715.000,-. Penggunaan anggaran untuk pemeliharaan peralatan bencana dan peralatan kantor disesuaikan dengan kondisi peralatan yang membutuhkan perbaikan	Untuk dilakukan inventarisasi peralatan sesuai kondisi yang ada diakhir tahun untuk antisipasi kejadian bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi

1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi, dengan target sebanyak 2 unit. Adapun target s.d triwulan IV TA. 2021 yaitu sebanyak 2 unit dan terealisasi 100%. Adapun pekerjaan yang dilakukan adalah Perbaikan lantai Posko (Rabat beton) serta pengecatan gedung kantor dan pagar.	Disediakan anggaran kas pada triwulan IV sebesar Rp. 30.000.000,- dan realisasi Rp. 29.514.000,- (98,38%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 486.000,-. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan perbaikan gedung kantor dan gudang logistik.	
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
1	05	01	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan, dengan target sebanyak 300 orang. Berdasarkan anggaran kas maka sub kegiatan ini rencananya dilakukan pada Triwulan III karena adanya PPKM Level 4 maka kegiatan tersebut di tunda pelaksanaannya pada Triwulan IV. Adapun realisasi hanya 280 org dengan capaian kinerja sebesar 92,33% hal ini disebabkan kegiatan yang dilaksanakan akhir tahun mengundang kepala desa, aparat desa dan relawan yang kemungkinan mempunyai kegiatan yang bersamaan pada akhir tahun. Namun telah diupayakan untuk mengundang peserta sesuai target yang telah direncanakan.	Disediakan anggaran pada triwulan III namun kegiatan baru dapat terlaksana pada triwulan IV disebabkan Karena Berdasarkan Instruksi Bupati sehubungan pelaksanaan PPKM yang semula dari PPKM level 3 menjadi PPKM level 4 sehingga pelarangan melakukan kegiatan yang menghadirkan banyak orang. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 107.286.470,- dan realisasi Rp. 86.193.250,- (80,34%) terdapat sisa anggaran yang cukup besar yaitu Rp. 21.093.220,- karena jumlah peserta yang hadir hanya 280 orang dari 300 orang peserta yang diundang, sehingga mempengaruhi realisasi keuangan beberapa jenis belanja yang disediakan untuk peserta sosialisasi.	Agar PPTK cermat menempatkan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga bisa berjalan tepat waktu
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			

1	05	01	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan, dengan target sebanyak 150 orang dan realisasi 116 org dengan capaian kinerja sebesar 77,33%. Berdasarkan anggaran kas sub kegiatan direncanakan pada Triwulan III karena adanya PPKM Level 4 maka kegiatan tersebut di tunda pelaksanaannya pada Triwulan IV. Capaian kinerja tidak sesuai dengan target karena beberapa peserta tidak sempat hadir karena bertepatan dengan pelaksanaan beberapa kegiatan di akhir tahun. Namun telah diupayakan untuk mengundang peserta sesuai dengan target yang telah direncanakan.	Disediakan anggaran sebesar Rp. 144.178.556,- dan terealisasi Rp. 128.714.150,- (89,27%). Terdapat sisa anggaran yang cukup besar yaitu Rp. 15.464.406,- karena jumlah peserta yang hadir hanya 116 orang dari 150 orang peserta yang diundang sehingga mempengaruhi realisasi keuangan beberapa jenis belanja yang disediakan untuk peserta pelatihan.	Agar PPTK cermat menempatkan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga bisa berjalan tepat waktu
1	05	01	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan, dengan target sebanyak 20 unit (kantung jenazah). direncanakan pada triwulan I TA. 2021 namun belum terealisasi karena mengalami refocusing anggaran sehingga mengalami pengurangan target dari 40 unit menjadi 20 unit, namun baru terealisasi pada triwulan IV TA. 2021 dengan capaian kinerja 100%.	Disediakan anggaran pada triwulan IV sebesar Rp 9.000.000,- dan terealisasi Rp 8.500.000,- (94,44%). Dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp 500.000,- yang merupakan sisa belanja yang tidak digunakan.	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi
1	05	01	2.02	07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Target kinerja sub kegiatan Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang disusun, dengan target 2 dokumen. Adapun realisasi s.d triwulan IV TA. 2021 yaitu telah dilakukakan penyusunan dokumen pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebanyak 2 dokumen (100%).	Disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 343.889.975,- dan terealisasi Rp 282.072.994,-(82,02%). Realisasi keuangan terdiri dari belanja modal pekerjaan fisik Rp. 215.126.094,20, Belanja ATK Rp. 4.283.000,-, Belanja Perjalanan Biasa Rp. 62.663.900,-, sedangkan untuk Belanja Cetak dan Penggandaan tidak terealisasi disebabkan anggaran penggandaan menggunakan Administrasi Proyek pekerjaan fisik dan untuk jilid dilakukan sendiri dengan ATK yang tersedia dan untuk Belanja Makan dan Minum Rapat yang diperuntukkan untuk rapat-rapat koordinasi dengan OPD lain terkait penanganan sarana dan prasarana infrastruktur terdampak bencana juga tidak terealisasi karena tidak terdapat kejadian bencana yang memerlukan penanganan yang signifikan yang sifatnya lintas OPD .	Untuk tetap melakukan koordinasi dengan OPD lain akan dilakukan utamanya dengan Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana infrastruktur penanganan pasca bencana sesuai dengan hasil identifikasi yang dilakukan

1	05	01	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat, dengan target sebanyak 45 org dan terealisasi 44 org (97,77%). Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan ini direncanakan pelaksanaannya pada Triwulan II TA. 2021, namun baru realisasi pada triwulan III. Administrasi kegiatan telah berjalan namun pelaksanaannya ditunda karena menyesuaikan kesediaan Narasumber dari BPBD Provinsi. Dan kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 3 Juli 2021.	Disediakan anggaran sebesar Rp. 85.784.820,- dan terealisasi Rp.68.059.200,- (79,34%). Terdapat sisa anggaran yang cukup besar yaitu Rp. 17.725.620,- karena jumlah peserta yang hadir hanya 44 orang sehingga mempengaruhi realisasi belanja makan minum peserta, biaya sewa penginapan dan pengadaan baju peserta.	Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.
1	05	01	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah warga negara yang ikut pelatihan, dengan target sebesar 450 org dan terealisasi 834 org dengan persentase capaian 185,33%. Sub kegiatan ini terdiri dari Apel Siaga Bencana dengan jumlah peserta 450 org dan Simulasi dengan jumlah peserta 384 org. Jumlah peserta simulasi melebihi dari target karena guru-guru sangat antusias untuk menghadirkan murid-muridnya untuk menghadiri kegiatan. Sedangkan jumlah peserta Apel Siaga Bencana bisa melebihi target karena adanya dukungan makanan dan minuman dari PT. Vale Indonesia dan dari Bank Sulselbar.	Disediakan Anggaran sebesar Rp. 51.974.210,- dan terealisasi Rp 51.119.000,- (98,35%). Dalam pelaksanaan Apel Siaga Bencana, jumlah peserta yang direncanakan hanya 200, namun yang diundang sebanyak 450 org dengan adanya dukungan makanan dan minuman untuk peserta dari PT. Vale Indonesia dan Bank Sulselbar, sehingga anggaran yang tersedia cukup untuk membiayai kegiatan.	
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
1	05	01	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Target kinerja sub kegiatan adalah Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa semua kejadian bencana yang terjadi pada bulan Januari s.d Desember 2021 (178 kejadian) yaitu Kejadian banjir 2, orang hilang/tenggelam 5 kejadian, kebakaran rumah 10 kejadian, kebakaran lahan 0 kejadian, cuaca ekstrim 6 kejadian, longsor 2 kejadian dan gempa bumi 153 kejadian dan semuanya direspon kurang dari 24 jam ketika laporan diterima dan dilakukan kaji cepat.	Disediakan anggaran sebesar Rp. 775.623.100,- dan terealisasi sebesar Rp 696.898.100,- atau sebesar 89,85 % dari pagu anggaran perubahan. Realisasi tidak sesuai dengan target karena terdapat 8 orang personil Tim Reaksi Cepat yang mengundurkan diri pada waktu yang berbeda dan terdapat juga 4 orang personil pengganti, sehingga berpengaruh terhadap realisasi belanja jasa (honor TRC) dan belanja makanan dan minuman aktifitas lapangan TRC.	Agar PPTK/bidang terkait segera menginventarisir jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) per 31 Desember 2021 dan mengajukan atau mengisi kekosongan personil.

1	05	01	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Target kinerja sub kegiatan adalah Persentase jumlah korban bencana yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana mulai bulan januari s.d Desember 2021 sebanyak 250 jiwa dan semuanya diberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Disediakan anggaran sebesar Rp 100.130.000,- dengan realisasi Rp. 57.656.000,- atau sebesar 57,58 %. hal ini disebabkan karena hingga triwulan IV tidak terdapat kejadian bencana berskala besar dan membutuhkan pembiayaan yang signifikan. Anggaran ini sifanya disediakan untuk mengantisipasi cuaca ekstrim diakhir tahun berdasarkan informasi kebencanaan yang ada.	Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.
1	05	01	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Target kinerja sub kegiatan adalah Persentase korban bencana yang terfasilitasi pelayanan kebutuhan dasarnya dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana pada bulan januari s.d Desember 2021 sebanyak 250 jiwa, dari jumlah tersebut, sebanyak 242 jiwa yang memerlukan bantuan logistik sedangkan selebihnya (korban org hilang/tenggelam) hanya diberikan bantuan pertolongan dan evakuasi. Bantuan logistik yang diberikan berupa sandang pangan maupun hunian sementara (tenda).	Disediakan anggaran sebesar Rp 160.491.078,- dengan realisasi keuangan Rp. 100.419.404,- atau sebesar 62,57 %. Terdapat sisa anggaran yang cukup besar yaitu belanja sandang pangan Rp 33.905.000,-, belanja paket pengiriman Rp 15.000.000, serta perjalanan dinas Rp 8.993.596,-. Faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi keuangan adalah Tidak terdapat kejadian bencana yang membutuhkan pembiayaan yang signifikan dan terdapat bantuan logistik penanggulangan bencana dari BPBD Provinsi di Makassar yang telah diserahkan pada bulan agustus 2021. Sedangkan paket pengiriman tidak terealisasi karena disediakan untuk biaya pengiriman peralatan namun terkendala administrasi sehingga tidak realisasi.	Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.
1	05	01	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	Target kinerja sub kegiatan adalah Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap kejadian bencana non alam epidemii/wabah penyakit dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa bencana non alam (covid-19) yang ditangani oleh BPBD terkait penyemprotan disinfektan di tempat-tempat strategis sesuai permintaan serta pemulasaran dan Pemakaman jenazah covid-19, semuanya direspn kurang dari 24 jam. Adapun jumlah masyarakat yang terkonfirmasi covid-19 (meninggal) sebanyak 141 jiwa dan dilakukan respon cepat pemulasaran kurang dari 24 jam setiap informasi yang diterima oleh TRC BPBD.	Disediakan anggaran sebesar Rp 169.948.818,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.160.260.100,- atau sebesar 94,30% dari pagu anggaran perubahan. Penggunaan anggaran yang cukup besar karena terjadi peningkatan jumlah korban meninggal terkonfirmasi Covid19 yang harus ditangani pada pertengahan tahun 2021 sampai awal bulan Desember 2021. Sisa anggaran sebesar Rp 9.688.718,- terdiri dari belanja ATK Rp 137.218,- belanja makan dan minum rapat Rp 5.250.000,- belanja makan dan minum aktifitas lapangan Rp 775.000,- dan belanja perjalanan dinas Rp 3.526.500,-. Belanja makan minum rapat tidak terealisasi karena kegiatan rapat terkait penanganan covid-19 dilakukan di Dinas Kesehatan (Satgas Covid-19). sedangkan penggunaan anggaran belanja perjalanan dinas disesuaikan dengan kegiatan pemulasaran jenazah covid-19 dilapangan	

BAB 4**PENUTUP**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 1 sasaran pendukung yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2021-2026.

Secara umum hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam pencapaian sasaran pada tahun 2021, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Realisasi Anggaran belanja APBD 2021 adalah sebesar Rp. 4.309.265.708,20,- (87,66%) yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 1,727,089,814,- (88,68%) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.320.974.800,- (86,02%) dan Belanja Modal Rp 266.201.094,20
- b. Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan bencana Daerah Tahun 2021 sebesar **100%** dengan ***predikat BAIK***.
- c. Persentase Capaian Kinerja sasaran pendukung yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan bencana Daerah Tahun 2021 sebesar **108,36%**, dengan ***predikat BAIK***.
- d. Persentase Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana berdasarkan jenis pelayanan dasar yaitu :
 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana : 88,23%
 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana : 100%
 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana : 100%
- e. Tindak lanjut atas rekomendasi dari penyusunan Laporan Kinerja Tahun Lalu adalah :
 - Target jangka menengah telah dimonitor pencapaiannya sesuai yang tertuang dalam Laporan Kinerja BPBD Tahun 2021 pada Tabel 11 hal. 27 (Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Jangka Menengah)
 - Capaian Kinerja dan monitoring rencana aksi belum dijadikan dasar pemberian penghargaan (reward) karena belum ada payung hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment

- f. Faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Tahun 2021 terhadap beberapa target sasaran Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Timur yaitu :
- Refocussing anggaran berdampak pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana Tahun 2021
 - Adanya refocussing anggaran yang berdampak pada pengurangan target beberapa sub kegiatan, khususnya terkait pengadaan barang yang tidak sesuai dengan perencanaan dalam RKBMD.
 - Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa
 - Adanya penerapan PPKM, beberapa sub kegiatan ditunda pelaksanaannya dan baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun sehingga realisasi belanja yang tidak sesuai dengan anggaran kas yang telah direncanakan
 - Terdapat beberapa jabatan struktural Eselon III dan IV yang masih kosong, mempengaruhi realisasi belanja gaji dan tunjangan
 - Keterlambatan PPTK dalam merampungkan administrasi pertanggungjawaban keuangan
 - Terdapat sub kegiatan yang sifatnya disediakan sehingga penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan
 - Pelaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan KAK dan anggaran kas yang telah disusun
 - Terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya disediakan sehingga penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kondisi atau kejadian bencana sehingga berdampak pada SILPA
 - Pengolahan data dan informasi pada lingkup bidang yang belum maksimal
 - Luasnya cakupan wilayah pelayanan penanggulangan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada.
- g. Adapun rekomendasi terkait peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu ditindaklanjuti oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Timur adalah sebagai berikut :
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kinerja secara berjenjang di tingkat SKPD
 - Meningkatkan peran serta masyarakat, swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga-lembaga pemerhati lingkungan dalam rangka penanggulangan bencana.

- Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam KAK dan mengacu kepada anggaran kas yang telah ditetapkan.
- Penempatan papan himbauan/peringatan dini bencana di beberapa titik rawan bencana
- Memaksimalkan pengolahan data dan informasi lingkup OPD
- Mencermati /kegiatan yang sifatnya disediakan untuk mengantisipasi SILPA program diakhir tahun
- Memprioritaskan program/kegiatan pengampuh Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana
- Meningkatkan koordinasi lintas sektoral terkait penanggulangan bencana

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja tahun 2021 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait pelaksanaan tugas fungsi BPBD Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi BPBD dalam pembangunan dapat lebih dirasakan manfaatnya.

Malili, 07 Februari 2021

**KEPALA PELAKSANA,**
Drs. MUH. ZABUR
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660930 198603 1 004



**L
A
M
P
I
R
A
N**



Lampiran I

**PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.43	0.43	100%

Jumlah Anggaran Tahun 2021 Rp **4,915,970,761.00**
Realisasi Anggaran Tahun 2021 Rp **4,309,265,708.20**



Lampiran II

**ANALISIS CAPAIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.43	0.43	100



TAHUN 2021
UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	Program	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan					% Capaian	Ket.
		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		
	PROGRAM UTAMA							
1.	Program Penanggulangan Bencana	1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Input : Jumlah Dana	Rupiah	107,286,470	86,193,250	80.34	
			Output : Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	0.10	0.093	93.00	
			Outcome : Persentase warga negara di daerah rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	%	0.10	0.093	93.00	
		a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (Per Jenis Bencana)	Input : Jumlah Dana	Rupiah	107,286,470	86,193,250	80.34	
			Output : Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	orang	300	280	93.33	



	2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Input	: Jumlah Dana	Rupiah	634,827,561	538,465,344.20	84.82	
		Output	: Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	0.21	0.33	157.14	
			: Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	%	100.00	100.00	100.00	
		Outcome	: Persentase warga negara di daerah rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	%	0.21	0.33	157.14	
	a. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Input	: Jumlah Dana	Rupiah	144,178,556	128,714,150	89.27	
		Output	: Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	orang	150	116	77.33	
	b. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Input	: Jumlah Dana	Rupiah	9,000,000	8,500,000	94.44	
		Output	: Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	unit	20	20.00	100.00	



		c. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Input : Jumlah Dana	Rupiah	343,889,975	282,072,994.20	82.02		
			Output :	Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi pasca bencana yang disusun	Dokumen	1	1.00	100.00	
				Jumlah dokumen pemulihan rekonstruksi pasca bencana yang disusun	Dokumen	1	1.00	100.00	
		d. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota	Input : Jumlah Dana	Rupiah	85,784,820	68,059,200	79.34		
			Output : Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat	orang	45	44.00	97.78		
		e. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Input : Jumlah Dana	Rupiah	51,974,210	51,119,000	98.35		
Output : Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	orang		450	834.00	185.33				
2.	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Input : Jumlah Dana	Rupiah	1,206,192,996	1,015,233,604	84.17			
		Output :	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	%	100	100	100.00		
		Outcome :	Persentase korban bencana yang terfasilitasi penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasarnya	%	100	100	100.00		



		a. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Input : Jumlah Dana	Rupiah	775,623,100	696,898,100	89.85	
			Output : Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	%	100	100	100.00	
		b. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Input : Jumlah Dana	Rupiah	100,130,000	57,656,000	57.58	
			Output : Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	%	100	100	100.00	
		c. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Input : Jumlah Dana	Rupiah	160,491,078	100,419,404	62.57	
			Output : Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	%	100	100	100.00	
		d. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/ Wabah Penyakit	Input : Jumlah Dana	Rupiah	169,948,818	160,260,100	94.30	
			Output : Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	%	100	100	100.00	



	PROGRAM PENDUKUNG							
1.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input : Jumlah Dana	Rupiah	95,479,712	77,728,998	81.41	
			Output : Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	%	100	100	100.00	
			Outcome : Persentase dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi yang disusun tepat waktu dan dimanfaatkan	%	100	100	100.00	
		a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Input : Jumlah Dana	Rupiah	22,315,263	20,277,000	90.87	
			Output : Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	Dokumen	3	3	100.00	
		b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Input : Jumlah Dana	Rupiah	11,332,889	7,584,500	66.92	
			Output : Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu	Dokumen	2	3	150.00	
		c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Input : Jumlah Dana	Rupiah	8,004,079	6,039,400	75.45	
			Output : Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu	Dokumen	2	3	150.00	



		d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input : Jumlah Dana	Rupiah	53,827,481	43,828,098	81.42	
			Output : Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	10	10	100.00	
		2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Input : Jumlah Dana	Rupiah	1,976,669,497	1,750,112,814	88.54	
			Output : Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	%	100	100	100.00	
			Outcome : Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	%	100	100	100.00	
		a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input : Jumlah Dana	Rupiah	1,914,900,589	1,695,089,814	88.52	
			Output : Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	orang	19	15	78.95	
		b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Input : Jumlah Dana	Rupiah	61,768,908	55,023,000	89.08	
			Output : Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	Dokumen	18	18	100.00	



		3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Input : Jumlah Dana	Rupiah	19,999,400	18,525,000	92.63	
			Output : Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	%	100	100	100.00	
			Outcome : Persentase laporan BMD pada perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	%	100	100	100.00	
		a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Input : Jumlah Dana	Rupiah	19,999,400	18,525,000	92.63	
			Output : Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Dokumen	4	4	100.00	
		4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Input : Jumlah Dana	Rupiah	72,450,000	65,373,150	90.23	
			Output : Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100.00	
			Outcome : Persentase data dan informasi pegawai perangkat daerah yang diadministrasikan	%	100	100	100.00	
		a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Input : Jumlah Dana	Rupiah	15,350,000	15,350,000	100.00	
			Output : Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	Stel	18	18	100.00	



		b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Input : Jumlah Dana	Rupiah	57,100,000	50,023,150	87.61	
			Output : Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	orang	10	15	150.00	
		5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Input : Jumlah Dana	Rupiah	508,062,650	493,505,950	97.13	
			Output : Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	%	100	100	100.00	
			Outcome : Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100	100	100.00	
		a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Jumlah Dana	Rupiah	17,440,000	16,970,000	97.31	
			Output : Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Jenis	8	8	100.00	
		b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Input : Jumlah Dana	Rupiah	29,349,250	27,930,500	95.17	
			Output : Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis	20	19	95.00	
		c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Jumlah Dana	Rupiah	47,625,000	36,881,000	77.44	
			Output : Jumlah Barang cetak dan/atau penggandaan yang disediakan	Jenis	3	3	100.00	



		d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Jumlah Dana	Rupiah	6,120,000	6,120,000	100.00	
			Output : Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Exemplar	60	60	100.00	
		e. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Input : Jumlah Dana	Rupiah	12,375,000	12,047,000	97.35	
			Output : Jumlah tamu yang difasilitasi	orang	275	272	98.91	
		f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input : Jumlah Dana	Rupiah	395,153,400	393,557,450	99.60	
			Output : Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	orang	58	80	137.93	
		6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Input : Jumlah Dana	Rupiah	45,647,000	37,875,000	82.97	
			Output : Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	%	100	100	100.00	
			Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100.00	



	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input : Jumlah Dana	Rupiah	45,647,000	37,875,000	82.97	
		Output : Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	unit	7	6	85.71	
	7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input : Jumlah Dana	Rupiah	76,495,475	67,888,754	88.75	
		Output : Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100.00	
		Outcome : Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	%	100	100	100.00	
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Jumlah Dana	Rupiah	4,195,475	3,740,500	89.16	
		Output : Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Surat	500	498	99.60	
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Jumlah Dana	Rupiah	52,500,000	44,348,254	84.47	
		Output : Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Rekening	36	36	100.00	
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input : Jumlah Dana	Rupiah	19,800,000	19,800,000	100.00	
		Output : Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	orang	2	2	100.00	



	8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input : Jumlah Dana	Rupiah	172,860,000	158,363,844	91.61	
		Output : Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	%	100	100	100.00	
		Outcome : Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang siap pakai	%	100	100	100.00	
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Input : Jumlah Dana	Rupiah	99,850,000	98,554,844	98.70	
		Output : Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit	13	13	100.00	
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input : Jumlah Dana	Rupiah	43,010,000	30,295,000	70.44	
		Output : Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	79	63	79.75	
	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Input : Jumlah Dana	Rupiah	30,000,000	29,514,000	98.38	
		Output : Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2	2	100.00	

